



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DAERAH DAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah serta berkat rahmat dan karunia Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025 –2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini tersusun berkat dukungan dan kerja sama seluruh jajaran pegawai serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi, saran, dan data yang dibutuhkan selama proses perumusan.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar merupakan wujud pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari tanggung jawab perangkat daerah dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Keseluruhan isi dokumen dirancang untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, lingkungan yang lestari, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan merata

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



Demikian kata pengantar ini disampaikan. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar. Kami terbuka terhadap segala bentuk saran dan masukan demi penyempurnaan dan keberhasilan implementasi Renstra ini.

Martapura, 18 September 2025

Kepala DPRKPLH

Kabupaten Banjar



Akhmad Bayhaqie, ST, MT

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19690909 199703 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	6
1.2. LANDASAN HUKUM	10
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	17
2.1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	17
2.1.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	19
2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	41
2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	60
2.1.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	63
2.1.5. MITRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	64
2.1.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	66
2.2. PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	68
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	68
2.2.2. Isu Strategis	72
2.2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	84
3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	85
3.3. RISIKO YANG TERJADI AKIBAT TIDAK TERCAPAIANYA TUJUAN DAN SASARAN	89
3.4. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPEDALITBANG TAHUN 2025-2029	90
3.5. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPRKPLH TAHUN 2025-2029	94
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029.....	102
4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS DAERAH	163
4.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	167
BAB V P E N U T U P	173



DAFTAR TABEL

Table 2.1.1 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025 – 2029	41
Table 2.1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	54
Table 2.1.3 Tabel Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten	55
Table 2.1.4 Daftar Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	56
Table 2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	60
Table 2.1.6 Pencapaian Indikator Kinerja SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	62
Table 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	70
Table 2.2.2 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	73
Table 3.2.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	88
Table 3.3.1 Register Resiko Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.....	89
Table 3.4.1 Penetapan Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	92
Table 3.5.1 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	96
Table 3.5.2 Lokus Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	98
Table 4.1.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	104
Table 4.1.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	124
Table 4.2.1 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	165
Table 4.3.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	170
Table 4.3.2 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup.....	171



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1.1 Struktur Organisasi (Proses, Prosedur, Mekanisme) Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penguatan perencanaan pembangunan daerah menjadi aspek krusial yang harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan terpadu.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal, serta menjamin kesinambungan pembangunan yang selaras dengan visi jangka panjang daerah, sinkronisasi antara naskah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipandang perlu menyusun Naskah Teknokratik Rencana Strategis sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan strategis lima tahunan.

Hal ini juga berlaku bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyediaan perumahan yang layak, penataan kawasan permukiman, serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banjar. Penyusunan Naskah Teknokratik ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa naskah teknokratik disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Dengan demikian, dokumen ini menjadi



instrumen penting dalam menjamin kesinambungan pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 yang telah tersusun, harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun sebagai instrumen kebijakan strategis yang menjabarkan peran dan fungsi Dinas sebagai kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.

Dokumen ini memuat arah pembangunan Dinas secara menyeluruh melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan dan keuangan daerah, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Selain itu, Renstra ini juga mengacu pada batas kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ini disusun dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Perubahan tersebut juga sejalan dengan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman operasional sekaligus acuan strategis dalam pelaksanaan tugas Dinas secara terarah, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya perwujudan visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Banjar. Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas selama lima tahun ke depan, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, khususnya di sektor perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup. Dalam penyusunannya, Renstra ini menggunakan beberapa pendekatan perencanaan yang telah diatur dalam ketentuan



perundang-undangan, guna menjamin keterpaduan dan relevansi dokumen terhadap kebutuhan pembangunan daerah, yakni:

- a. Pertama, Pendekatan Politik, yaitu penyusunan Renstra dilakukan sebagai bentuk penjabaran atas visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah memperoleh legitimasi rakyat melalui pemilihan umum. Program-program yang ditawarkan kepala daerah selama masa kampanye menjadi dasar utama perumusan arah kebijakan dan program prioritas daerah, termasuk dalam sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- b. Kedua, Pendekatan Teknokratik, yakni penyusunan dokumen dilakukan secara sistematis dan ilmiah dengan menggunakan metode, data, dan analisis yang terukur, agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara objektif, berdasarkan kondisi riil serta prediksi kebutuhan pembangunan ke depan.
- c. Ketiga, Pendekatan Partisipatif, yaitu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam proses penyusunan perencanaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas, menciptakan rasa memiliki terhadap proses pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas perencanaan.
- d. Keempat, Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), yaitu pendekatan yang dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah, serta dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten. Proses perencanaan ini diselenggarakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar terjadi sinergi antara perencanaan makro dengan kebutuhan sektoral dan lokal secara konkret.



Dengan memadukan keempat pendekatan tersebut, penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar diharapkan mampu menghasilkan dokumen yang komprehensif, inklusif, dan implementatif, serta dapat menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan pembangunan kawasan permukiman yang layak, berkelanjutan, dan lingkungan hidup yang berkualitas di Kabupaten Banjar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);
- (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- (11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- (14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (15) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- (16) Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sub Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- (17) Peraturan Menteri LHK Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman



- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD);
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2045;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021–2041;
- (21) Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- (22) Peraturan Bupati Banjar No. 22 Tahun 2022 tentang uraian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;
- (23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- (24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) Tanggal 20 Agustus 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang



tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 ke dalam perencanaan strategis sektoral yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Dokumen ini disertai dengan indikator kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk merumuskan dokumen perencanaan strategis yang digunakan sebagai pedoman bagi pimpinan, staf, dan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kawasan permukiman kumuh, peningkatan akses terhadap hunian layak, penguatan daya dukung lingkungan hidup, serta penanggulangan risiko bencana dan perubahan iklim.

Selain itu, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama di internal Dinas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan perangkat daerah lain, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang inklusif, tertata, serta lingkungan hidup yang lestari di Kabupaten Banjar.



Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kejelasan arah pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup.
- b) Menjadi instrumen komunikasi dan koordinasi antar-unit kerja serta dengan pemangku kepentingan eksternal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c) Mendorong terwujudnya kesepahaman dan komitmen seluruh aparatur dinas dalam pencapaian kinerja dan pelayanan publik.
- d) Memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : **PENDAHULUAN**, Berisi uraian mengenai Latar Belakang penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Kedudukan dan Peran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.
- BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**, Memuat penjabaran mengenai peran, tugas, dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup. Bab ini juga menyajikan gambaran sumber daya organisasi (SDM, keuangan, sarpras, dan kelembagaan), capaian kinerja pada periode Renstra sebelumnya, serta mengidentifikasi hambatan utama, tantangan, dan isu-isu strategis yang perlu direspons dalam perencanaan lima tahun ke depan.
- BAB III : **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**, Berisi pemetaan visi dan misi Kepala Daerah serta penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus sebagai



kerangka kerja pencapaian kinerja dinas yang terukur dan berorientasi hasil.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, Memuat uraian program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi pelaksanaan dari strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan. Bab ini juga mencakup program lintas perangkat daerah dan lintas kewilayahan, berikut dengan indikasi pagu anggaran, sumber pendanaan, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis selama periode 2025–2029.

BAB V : PENUTUP, Berisi rangkuman substansi utama dari dokumen Renstra, serta penekanan penting pada mekanisme pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Strategis Dinas, guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup secara efektif dan berkelanjutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta lingkungan hidup.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar memiliki tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di dua urusan bidang, yakni:

- a) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan
- b) Lingkungan hidup,

serta urusan lain yang secara teknis menjadi kewenangan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.



Pada awalnya, urusan lingkungan hidup dan urusan perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Banjar ditangani oleh dua perangkat daerah yang berbeda, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjar. Masing-masing dinas menjalankan fungsi teknis sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Namun, dalam rangka penyederhanaan struktur birokrasi, peningkatan efisiensi kelembagaan, serta untuk mendorong sinergi perencanaan dan pelaksanaan program yang saling terkait — khususnya dalam hal pengelolaan kawasan, penyediaan hunian layak, dan pelestarian lingkungan — maka dilakukan evaluasi kelembagaan terhadap perangkat daerah yang menangani urusan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Banjar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengatur penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi satu perangkat daerah yang baru, yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Penggabungan ini kemudian diperkuat secara teknis melalui penerbitan Peraturan Bupati Banjar Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.



Dengan terbentuknya dinas ini, sejak tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang perumahan, kawasan permukiman, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan organisasi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas bidang dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, serta penataan ruang yang berwawasan lingkungan.

Penggabungan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat kontribusi sektor perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah dan keberlanjutan pembangunan daerah

2.1.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b) Merumuskan kebijakan teknis bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c) Menyelenggarakan kegiatan bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kapasitas



- lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d) Mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas serta pelaksanaan operasional kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
 - e) Mengawasi dan mengendalikan bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g) Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah daerah di bidang penyediaan perumahan, kawasan permukiman, penataan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah B3, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - h) Menyelenggarakan standar pelayanan minimal di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - i) Membina administrasi, organisasi, tata laksana dan personil di lingkungan Dinas;
 - j) Merumuskan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - k) Membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan UPTD;



- l) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, fungsi Dinas dapat disarikan sebagai berikut:

- a) Perencanaan dan Perumusan Kebijakan Teknis, yang meliputi:
 - Penyediaan perumahan (umum, komersil, swadaya)
 - Pengelolaan kawasan permukiman
 - Penataan lingkungan hidup
 - Pengelolaan sampah dan limbah B3
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional, termasuk:
 - Fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, dan pelayanan public
 - Peningkatan kualitas permukiman dan prasarana dasar
 - Pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam
- c) Pengendalian dan Pengawasan, yaitu:
 - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan seluruh bidang teknis
 - Penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa
 - Pengawasan izin lingkungan dan pengelolaan limbah
- d) Koordinasi dan Kerja Sama, mencakup:
 - Sinergi dengan instansi pusat, provinsi, swasta dan Masyarakat
 - Penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat
- e) Pelayanan teknis administratif dan pemenuhan SPM, termasuk:
 - Dukungan terhadap Sekretariat Daerah dan Bupati
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup



- f) Pembinaan internal Dinas, berupa:
- Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan organisasi
 - Evaluasi kinerja dan pelaporan kepada Kepala Daerah

B. KELOMPOK TUGAS

Unsur-unsur Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penyediaan Perumahan;
- c. Bidang Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

C. FUNGSI

Pengelompokan tugas perangkat daerah berdasarkan fungsi adalah:

i. Sekretariat

Mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan program di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan,



keprotokolan, kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

ii. Bidang Penyediaan Perumahan

Mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan penyediaan perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kerja program dan anggaran penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- pengoordinasian kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya



iii. Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja program peningkatan kualitas permukiman dan keterpaduan PSU;
- Perumusan kebijakan teknis terkait urusan tersebut;
- Koordinasi kegiatan peningkatan kualitas dan PSU permukiman;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tersebut;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

iv. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas LH;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan tersebut;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

v. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan sampah, Limbah B3, dan kemitraan;
- Koordinasi kegiatan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan tersebut;
- Pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan sampah dan Limbah B3;



- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

vi. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja dan program pemantauan serta pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan tersebut;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tersebut;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

vii. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

- PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Mengatur tugas, tanggung jawab, jenjang jabatan, dan mekanisme pengangkatan serta pembinaan bagi pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang lingkungan hidup
- PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. Menetapkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional yang bertugas memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai



pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
- PermenPANRB Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman. Mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan serta penataan bangunan gedung dan kawasan permukiman
- PermenPANRB Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman. Menetapkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pembangunan dan penataan bangunan gedung serta kawasan permukiman.

D. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengelompokan tugas perangkat daerah berdasarkan fungsi adalah:

i. Sekretariat

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;



- memantau pengelolaan anggaran dan Aset di lingkungan Dinas sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
- menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas;
- menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Dinas;
- mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Dinas dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan; dan
- Sub Bagian Keuangan dan Aset.

❖ **Tugas Subbagian :**

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.



Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

- a) penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- c) mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d) melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e) melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas;
- g) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- h) mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
- i) menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
- k) membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;



- l) melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Dinas;
- m) menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

➤ **Sub Bagian Perencanaan**

Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- b) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
- c) melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas beserta dokumen penunjangnya;
- d) melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- e) menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Dinas;
- f) menyusun Profil Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan masukan Unit di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;



- h) menyusun laporan program dan kegiatan Dinas secara berkala berdasarkan masukan Unit di lingkungan Dinas;
- i) menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan Unit di lingkungan Dinas; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan Aset.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

- a) merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b) menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Dinas;
- c) menyiapkan bahan dan Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- d) menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- e) menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;



- f) menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

ii. Bidang Penyediaan Perumahan

Uraian tugas Bidang Penyediaan Perumahan adalah sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- mengoordinasikan kegiatan di bidang penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- menyelenggarakan pemantauan kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan



swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

- menyelenggarakan teknis urusan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala Dinas

Bidang Penyediaan Perumahan terdiri dari:

- Seksi Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil;
- Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya; dan
- Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

❖ **Tugas Subbidang/Seksi :**

➤ **Seksi Penyediaan Perumahan Umum dan Komersil**

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan perumahan umum dan komersil Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan umum dan komersil;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan umum dan komersil;
- c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan para pelaku pembangunan perumahan dan instansi lainnya terkait penyediaan perumahan umum dan komersil;



- d) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap usulan peningkatan kualitas perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e) melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- f) melaksanakan persetujuan dokumen teknis penerbitan izin pembangunan perumahan dan pengembangan perumahan;
- g) melaksanakan proses penerbitan/fasilitasi sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG -Rusun);
- h) melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

➤ **Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya**

melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan perumahan swadaya
Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan swadaya;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan swadaya;
- c) memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat umum dan Masyarakat Berpenghasilan



- Rendah (MBR) untuk menempati rumah yang layak huni;
- d) melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - e) menghimpun data Rumah Tidak Layak huni (RTLH);
 - f) melaksanakan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - g) melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - h) melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah;
 - i) meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, peningkatan kualitas dan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - j) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi, swasta/masyarakat terkait penyediaan perumahan swadaya;
 - k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan perumahan swadaya; dan
 - l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

➤ **Seksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan**

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:



- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- c) melaksanakan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- e) melaksanakan proses verifikasi dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- f) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi, swasta/ masyarakat terkait prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

iii. Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja program peningkatan kualitas permukiman dan keterpaduan PSU;
- Perumusan kebijakan teknis terkait urusan tersebut;
- Koordinasi kegiatan peningkatan kualitas dan PSU permukiman;



- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tersebut;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dina

Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :

- Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
- Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
- Seksi Keterpaduan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman

iv. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas LH;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan tersebut;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hudup

v. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan sampah, Limbah B3, dan kemitraan;



- Koordinasi kegiatan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan tersebut;
- Pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan sampah dan Limbah B3;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari:

- Seksi Pengelolaan Sampah
- Seksi Pengelolaan Limbah Bahab Berbahaya dan Beracun
- Seksi Kemitraan Pengelolaan Sampah

vi. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana kerja dan program pemantauan serta pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan;
- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan tersebut;
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tersebut;
- Pelaksanaan fungsi lain dari Kepala Dinas

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
- Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup



vii. Kelompok Jabatan Fungsional

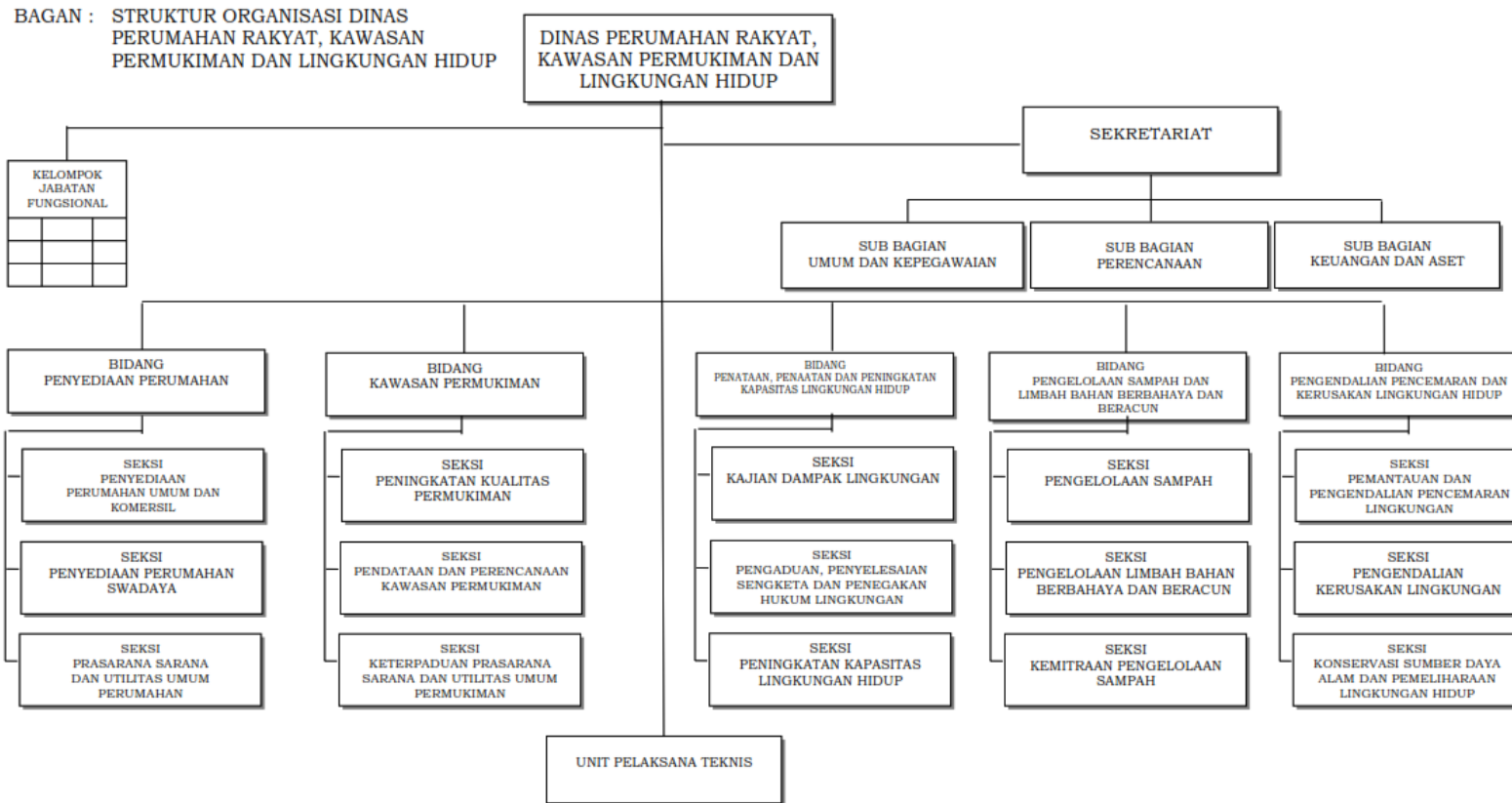
Kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan, yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

- PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Mengatur tugas, tanggung jawab, jenjang jabatan, dan mekanisme pengangkatan serta pembinaan bagi pejabat fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang lingkungan hidup
- PermenPANRB Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup. Menetapkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional yang bertugas memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
- PermenPANRB Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman. Mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pejabat fungsional dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembangunan serta penataan bangunan gedung dan kawasan permukiman
- PermenPANRB Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman. Menetapkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional



yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam pembangunan dan penataan bangunan gedung serta kawasan permukiman

E. STRUKTUR ORGANISASI (PROSES, PROSEDUR, MEKANISME)



Gambar 2.1.1.1 Struktur Organisasi (Proses, Prosedur, Mekanisme) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah pra syarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip – prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel, dan pengawasan yang efektif.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas, penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini di masa yang akan datang.

Terkait dengan hal tersebut diatas , jumlah aparatur Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2025 berjumlah 109 (Seratus Sembilan) orang ASN dan Tenaga Kontrak sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan tugasnya juga di dukung oleh petugas kebersihan, petugas pertamanan, petugas TPA, petugas Taman Kehati, dan petugas PJU.

Komposisi jabatan dan struktur organisasi pada Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2.1.1 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025 – 2029

NAMA UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN	BEZZETING PEGAWAI TAHUN 2024	KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK	PROYEKSI PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEPALA DINAS	1	1	1	1	1	1	1	1



SEKRETARIS	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1	1	1	1	1	1	1
JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	2	2	2	2	2	2	2
JF Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Arsiparis Penyelia	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Arsiparis Mahir	0	2	2	2	2	2	2	2
JF Pranata Komputer Terampil	1	1	1	1	1	1	1	1
JF Arsiparis Terampil	0	3	3	3	3	3	3	3
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	2	2	2	2	2	2
Penata Layanan Operasional	0	3	3	3	3	3	3	3
Pengolah Data dan Informasi	0	2	2	2	2	2	2	2
Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1	3	3	3	3	3	3	3
Operator layanan Operasional	0	3	3	3	3	3	3	3



Pengelola Umum Operasional	6	21	21	21	21	21	21	21
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN	1	1	1	1	1	1	1	1
JF Perencana Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Perencana Ahli Pertama	1	4	4	4	4	4	4	4
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	1	1	1	1	1	1
Penata Layanan Operasional	1	4	4	4	4	4	4	4
Pengolah Data dan Informasi	0	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET	1	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Laksana Barang Terampil	0	2	2	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	1	1	1	1	1	1
Penata Layanan Operasional	1	7	7	7	7	7	7	7
Pengolah Data dan Informasi	1	1	1	1	1	1	1	1
Pengelola layanan operasional	0	1	1	1	1	1	1	1



Pengadministrasi Perkantoran	2	6	6	6	6	6	6	6
KEPALA BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN UMUM DAN KOMERSIL	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN SWADAYA	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	0	7	7	7	7	7	7	7
JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	1	2	2	2	2	2	2	2



JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	1	12	12	12	12	12	12	12
JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	0	2	2	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	2	2	2	2	2	2
Penata Layanan Operasional	1	6	6	6	6	6	6	6
Pengolah Data dan Informasi	0	6	6	6	6	6	6	6
Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1	2	2	2	2	2	2	2
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI KETERPADUAN SARANA PRASARANA DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN	1	1	1	1	1	1	1	1



JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	0	2	2	2	2	2	2	2
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	0	2	2	2	2	2	2	2
JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Penyelia	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Mahir	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penata Laksana Penyehatan	0	1	1	1	1	1	1	1



Lingkungan Terampil								
JF Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula	0	1	1	1	1	1	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	2	2	2	2	2	2
Penata Layanan Operasional	1	12	12	12	12	12	12	12
Pengolah data dan Informasi	0	2	2	2	2	2	2	2
Pengadministrasi Perkantoran	1	2	2	2	2	2	2	2
Operator layanan Operasional	0	10	10	10	10	10	10	10
KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENGADUAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS	1	1	1	1	1	1	1	1



LINGKUNGAN HIDUP								
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	0	2	2	2	2	2	2	2
JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	0	2	2	2	2	2	2	2
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	4	4	4	4	4	4	4
JF.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	0	2	2	2	2	2	2	2
JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	1	2	2	2	2	2	2	2
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	2	2	2	2	2	2
Penata Layanan Operasional	1	8	8	8	8	8	8	8
Pengolah Data dan Informasi	0	2	2	2	2	2	2	2
Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1



BERBAHAYA DAN BERACUN								
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN SAMPAH	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI KEMITRAAN PENGOLAHAN SAMPAH	1	1	1	1	1	1	1	1
JF.Pengawas Lingkungan Hidup Muda	0	2	2	2	2	2	2	2
JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	0	6	6	6	6	6	6	6
JF.Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	0	21	21	21	21	21	21	21
JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	1	12	12	12	12	12	12	12
Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	3	3	3	3	3	3
Penata Layanan Operasional	1	16	16	16	16	16	16	16
Pengolah Data dan Informasi	0	1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
Pengadministrasi Perkantoran	1	3	3	3	3	3	3	3



Pengelola Umum Operasional	5	663	663	663	663	663	663	663
Operator layanan Operasional	11	27	27	27	27	27	27	27
Operator layanan Operasional	17	27	27	27	27	27	27	27
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (PKL)	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	1	1	1	1	1
JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	0	5	5	5	5	5	5	5
JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	0	4	4	4	4	4	4	4



JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	2	11	11	11	11	11	11	11
JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	2	6	6	6	6	6	6	6
Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	2	2	2	2	2	2
Penata Layanan Operasional	0	9	9	9	9	9	9	9
Pengolah Data dan Informasi	0	5	5	5	5	5	5	5
Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
Pengelola Layanan Operasional	0	113	113	113	113	113	113	113
Operator layanan Operasional	4	6	6	6	6	6	6	6
KEPALA UPTD PERSAMPAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	1	1	1	1	1	1
Penata Layanan Operasional	0	6	6	6	6	6	6	6
Pengolah Data dan Informasi	0	17	17	17	17	17	17	17
Pengadministrasi Perkantoran	3	17	17	17	17	17	17	17
Operator Alat Berat	0	10	10	10	10	10	10	10



Operator Layanan Operational	0	2	2	2	2	2	2	2
Operator Layanan Operational	2	2	2	2	2	2	2	2
Pengelola Umum Operational	0	54	54	54	54	54	54	54
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	1	1	1	1	1	1	1	1
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN jf pengendali dampak lingkungan pertama	0	3	3	3	3	3	3	3
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN jf pengendali dampak lingkungan penyelia	0	2	2	2	2	2	2	2
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN jf pengendali dampak lingkungan mahir	0	2	2	2	2	2	2	2
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN jf pengendali dampak lingkungan terampil	0	4	4	4	4	4	4	4



UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN pranata laboratorium terampil	0	2	2	2	2	2	2	2
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN penata layanan operasional	0	2	2	2	2	2	2	2
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN pengolah data dan informasi	0	1	1	1	1	1	1	1
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN pengelola layanan operasional	0	2	2	2	2	2	2	2
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN pengadministrasi perkantoran	0	1	1	1	1	1	1	1
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN operator layanan operasional	0	3	3	3	3	3	3	3

Berdasarkan data diatas, jenjang Eselonering menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Fungsi koordinasi dan kerjasama merupakan fungsi yang strategis yang dijalankan oleh 5 (lima) bidang dan sekretariat. Lima bidang menjalankan fungsi teknis dalam Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Pengelolaan



Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Selain tersebut diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga memiliki UPTD Laboratorium Lingkungan dan UPTD Persampahan yang dipimpin oleh kepala UPT dan Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan kegiatan.

Kondisi Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2.1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	S.3	S.2	S.1	D.3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1.	Kepala Dinas		1						1
2.	Sekretariat			8	1	5	1		15
3.	Bidang Penyediaan Perumahan		3	1					4
4.	Bidang Kawasan Permukiman		3	2		1			6
5.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		1	4		9	15	6	35
6.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1	3	3		6	2	1	16
7.	Bidang Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		2	4		1			7



8.	UPT Persampahan			1		3	1	1	6
Jumlah		1	13	23	1	25	19	8	90

Table 2.1.3 Tabel Jumlah Pegawai Tidak Tetap Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S.1	95
2	D. III	9
3	SMA	6
Jumlah		110

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan dengan tingkat pendidikannya, berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang berpendidikan S.1 sebanyak 23 orang dari jumlah Pegawai 90 orang, S.2 sebanyak 13 orang dan S.3 sebanyak 1 orang serta dibantu oleh tenaga tidak tetap/kontrak sebanyak 110 orang sebagai penunjang pengadministrasian dan penunjang pelaksanaan kegiatan SKPD. Tentunya ini menjadi modal dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai dinas yang membantu Bupati.

B. SARANA DAN PRASARANA

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki setiap SKPD. Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar mempunyai aset sejak berdirinya BAPEDALDA dan Dinas Perumahan Permukiman sebagaimana daftar berikut:



Table 2.1.4 Daftar Aset Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	154.889.749.116,84
1.3.1	TANAH	50.558.619.945,00
1.3.1.01	TANAH	50.558.619.945,00
1.3.1.01.01	TANAH PERSIL	4.036.334.335,00
1.3.1.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	2.784.783.335,00
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	1.251.551.000,00
1.3.1.01.03	LAPANGAN	46.522.285.610,00
1.3.1.01.03.07	TANAH UNTUK JALAN	46.522.285.610,00
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	7.852.423.141,61
1.3.2.01	ALAT BESAR	467.471.500,00
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	467.471.500,00
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	48.000.000,00
1.3.2.01.03.05	POMPA	20.171.500,00
1.3.2.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	399.300.000,00
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	2.109.851.820,00
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.017.151.820,00
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	717.638.350,00
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1.012.428.425,00
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	253.905.000,00
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	33.180.045,00
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	92.700.000,00
1.3.2.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	92.700.000,00
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	438.682.510,00
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	62.155.000,00
1.3.2.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	62.155.000,00
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	376.527.510,00
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	149.377.510,00
1.3.2.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	227.150.000,00
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	15.675.000,00
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	15.675.000,00
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	15.675.000,00

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3.082.629.553,93
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	432.456.121,06
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	43.727.107,36
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	172.299.599,70
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	216.429.414,00
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	2.065.056.649,20
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	114.718.365,00
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	201.804.369,48
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	915.954.282,48
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	140.936.210,00
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	661.710.090,24
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	29.933.332,00
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	585.116.783,67
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	188.170.456,67
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	64.210.740,00
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	211.994.023,00
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	89.782.913,00
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	30.958.651,00
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	195.807.263,04
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	120.126.513,04
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	75.134.513,04
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	40.177.000,00
1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	4.815.000,00
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	69.772.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	41.332.000,00
1.3.2.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	25.740.000,00
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2.700.000,00
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	5.908.750,00
1.3.2.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	5.908.750,00
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	34.450.000,00
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	22.000.000,00
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	22.000.000,00
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	12.450.000,00

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	12.450.000,00
1.3.2.10	KOMPUTER	1.507.855.494,64
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	1.127.096.427,35
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	1.127.096.427,35
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	380.759.067,29
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	8.446.000,00
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	254.195.117,29
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	118.117.950,00
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	19.054.497.711,07
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	18.559.489.361,07
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18.092.064.388,52
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	15.311.699.384,97
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	98.730.000,00
1.3.3.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	1.831.834.972,55
1.3.3.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	265.714.031,00
1.3.3.01.01.36	TAMAN	584.086.000,00
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	467.424.972,55
1.3.3.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	467.424.972,55
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	495.008.350,00
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	495.008.350,00
1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	400.000.000,00
1.3.3.04.01.04	PAGAR	95.008.350,00
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	75.485.695.937,29
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	49.058.877.533,29
1.3.4.01.01	JALAN	49.058.877.533,29
1.3.4.01.01.05	JALAN DESA	8.521.991.510,54
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	40.345.347.022,75
1.3.4.01.01.10	JALAN LAINNYA	191.539.000,00
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	2.074.683.750,00
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.271.462.750,00
1.3.4.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	1.271.462.750,00
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	803.221.000,00
1.3.4.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	803.221.000,00



1.3.4.03	INSTALASI	9.145.250.450,00
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	9.145.250.450,00
1.3.4.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	9.145.250.450,00
1.3.4.04	JARINGAN	15.206.884.204,00
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	15.206.884.204,00
1.3.4.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	15.206.884.204,00
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	1.938.512.381,87
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.645.964.381,87
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1.645.964.381,87
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	2.275.000,00
1.3.5.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	1.011.000,00
1.3.5.01.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	23.952.000,00
1.3.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	45.937.730,00
1.3.5.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	295.479.000,00
1.3.5.01.01.11	BUKU LAPORAN	1.277.309.651,87
1.3.5.05	TANAMAN	292.548.000,00
1.3.5.05.01	TANAMAN	292.548.000,00
1.3.5.05.01.01	TANAMAN	292.548.000,00
1.5	ASET LAINNYA	1.288.852.936,00
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	1.288.852.936,00
1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN	1.288.852.936,00
1.5.4.01.01	ASET LAIN-LAIN	1.288.852.936,00
1.5.4.01.01.01	ASET RUSAK BERAT/USANG	1.288.852.936,00
1.5.4.01.01.01.02	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	1.288.852.936,00



2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. CAPAIAN KINERJA DALAM PELAKSANAAN RENSTRA SEBELUMNYA

Dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2022-2026 ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis, adapun capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table 2.5 dibawah ini :

Table 2.1.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					Realisasi					Persentase Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Terwujudnya Pembangunan Yang Berkelanjutan		INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	70.90	72.10	62.25	62.58	71.39	59.25	67.27	66.03	71.62	74.59	83.57%	86.36%	106.07%	114.45%	104.48%
			PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	n/a	n/a	97.23%	98.02%	98.52%	110.80	n/a	97.80%	97.69%	98.43%	113.22%	n/a	100.59%	99.66%	99.91%
		Meningkatnya perumahan yang layak huni	1. Persentase rumah Layak Huni	n/a	n/a	97.23%	98.02%	98.52%	110.80	n/a	97.80%	97.69	98.43%	113.22%	n/a	100.59%	99.66%	99.91%
			2. Persentase PSU yang memadai	n/a	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	n/a	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	n/a	n/a	100.00%	100.00%	100.00%
		Kawasan Permukiman yang layak	Persentase kawasan kumuh	n/a	n/a	91.92%	82.76%	80.84%	n/a	n/a	86.67%	84.74	79.75%	n/a	n/a	94.29%	102.39%	98.65%
		Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan	Indeks Kualitas Air (IKA)	41	43	50.3	50.4	71.96	47.33	53.56	50.93	58.8	64.15	100%	100%	101.25%	116.67%	89.15%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	108		110	76.93	77.03	71.21	79.80	88.51	87.9	92.68	94.62	73.88%	80.46%	114.26%	120.32%	132.87%		



		Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) / Indeks Kualitas Lahan (IKL) (Sejak 2025 dst)	66.54	67.46	55.64	56.78	70.73	52.8	51.51	51.51	54.69	55.5	79.35%	76.35%	92.58%	96.32%	78.47%
		Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	n/a	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	n/a	n/a	100.00%	100.00%	100.00%	n/a	n/a	100.00%	100.00%	100.00%
		Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	n/a	24	72.00%	71.00%	70.00%	n/a	24	93.01%	69.34%	72.65%	n/a	100%	129.18%	97.66%	103.79%



B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SPM

Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar merujuk kepada penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Table 2.1.6 Pencapaian Indikator Kinerja SPM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

No	Jenis Pelayanan Dasar	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman									
1.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	1061	937	88,31%	15	15	100,00%	82	82	100,00%
1.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13	13	100%	13	13	100,00%	0	0	0,00%



2.1.4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan mandat tersebut, perangkat daerah menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang menjadi prioritas intervensi strategis selama periode 2025–2029.

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar meliputi:

A. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Merupakan kelompok utama penerima manfaat dalam program perumahan layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta bantuan sosial berbasis kawasan permukiman.

B. Pemerintah Desa dan Kelurahan

Sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, penataan kawasan permukiman berbasis partisipatif, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik skala komunitas, serta pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sensitif terhadap isu perumahan dan lingkungan.

C. Komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Kelompok ini berperan sebagai penggerak lokal dalam program kampung iklim, gerakan bersih lingkungan, pengelolaan sampah berbasis 3R, dan pelestarian sumber daya alam secara partisipatif dan berkelanjutan.



D. Pengembang, Dunia Usaha dan Dunia Industri

Sebagai pelaku dalam penyediaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, dan pengelolaan lingkungan hidup, kelompok ini menjadi sasaran kebijakan dalam penguatan tata kelola pembangunan berwawasan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan (UKL-UPL), serta penerapan prinsip green infrastructure.

E. Satuan Pendidikan dan Generasi Muda

Merupakan kelompok sasaran program pendidikan lingkungan hidup, penumbuhan nilai-nilai pelestarian alam, serta kampanye gaya hidup ramah lingkungan melalui sekolah-sekolah adiwiyata dan program edukasi lainnya.

2.1.5. MITRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak lintas sektor. Kolaborasi ini menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, serta pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Sinergi lintas aktor ini juga bertujuan memperluas jangkauan intervensi, meningkatkan akuntabilitas layanan publik, dan memastikan keberlanjutan program-program prioritas.

Adapun mitra utama dinas kami meliputi:

a) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

Kolaborasi dilakukan bersama perangkat daerah seperti:

- **Bappedalitbang**, dalam perencanaan kawasan permukiman, perumahan rakyat, serta kawasan rawan bencana dan kumuh.



- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, dalam pembangunan dan rehabilitasi prasarana dasar permukiman.
- **Dinas Sosial**, untuk integrasi data rumah tidak layak huni dan penerima bantuan.
- **Dinas Kesehatan**, dalam penguatan sanitasi lingkungan dan penanganan dampak pencemaran.
- **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi**, dalam pengawasan, pelaporan, dan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL).

b) Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan
Kemitraan dibangun dalam pelaksanaan program berbasis wilayah seperti:

- Penataan kawasan permukiman kumuh.
- Peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH).
- Program kampung iklim dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat desa.
- Pembentukan dan pendampingan kader lingkungan serta relawan sanitasi.

c) TNI, POLRI dan Lembaga Penanggulangan Bencana (BPBD)
Sebagai mitra dalam penataan kembali kawasan terdampak bencana, relokasi hunian, penyediaan hunian darurat, dan pemulihan fungsi lingkungan pascabencana.

d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Lokal, dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Persampahan
Kelompok ini menjadi mitra strategis dalam:

- Edukasi dan kampanye gaya hidup ramah lingkungan.
- Penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.



- Pendampingan teknis dalam pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan sampah rumah tangga melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- KSM Persampahan secara khusus berperan aktif dalam operasionalisasi layanan persampahan di banyak desa dan permukiman padat, serta menjadi pelaku utama dalam pengembangan unit usaha daur ulang dan bank sampah.
- Keberadaan KSM Persampahan telah terbukti mampu memperkuat capaian pengelolaan sampah skala lokal, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

e) Swasta dan Dunia Usaha

Menjadi mitra dalam program:

- Tanggung jawab sosial perusahaan (**CSR**) untuk perumahan dan lingkungan.
- Pengembangan **green building**, **eco-housing**, dan kawasan permukiman berwawasan lingkungan.
- Kemitraan dalam pengembangan **teknologi pengolahan limbah**, **biopori**, **instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal**, serta fasilitas pendukung lingkungan lainnya

2.1.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Secara umum, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar memiliki faktor eksternal dan Internal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Kabupaten Banjar dalam lima tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Semakin tumbuh dan berkembangnya hunian perumahan dan industri
- b. Belum adanya tenaga fungsional pada Dinas Perumah Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar
- c. Belum tercukupinya jumlah staf di sekretariat khususnya perencana dan masing – masing bidang
- d. Adanya tenaga terlatih yang dimutasi keluar SKPD
- e. Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban
- f. Terbatasnya dana anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terakomodir di dalam proses penganggaran
- g. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Persentase tersedianya luas RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota / kawasan perkotaan
- h. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan
- i. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan kualitas perumahan dan permukiman yang baik
- j. Urbanisasi yang dapat berakibat tumbuhnya permukiman kumuh

Sedangkan untuk peluangnya sebagai berikut:

- a. Tersedianya tenaga teknis yang terlatih dan kompetitif
- b. Terbentuknya jabatan UPT untuk bidang laboratorium lingkungan dan persampahan
- c. Tersedianya anggaran dana untuk pelatihan peningkatan SDM
- d. Adaya peraturan perundang – undangan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



- e. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup yang berkesinambungan
- f. Adanya struktur organisasi dan tata kerja serta uraian tugas yang jelas
- g. Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat
- h. Tersedianya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serat dukungan anggaran bantuan keuangan provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah

Meskipun budaya dan peluang yang terjadi pada 5 tahun belakangan masih belum begitu bagus, namun untuk 5 tahun yang akan datang tantangan – tantangan tersebut memberikan optimistis yang positif dengan bergabungnya Bidang Penyedia Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman.

2.2. PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi awal terhadap potensi, permasalahan, dan isu strategis yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Salah satu potensi utama yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup secara kolaboratif dan partisipatif. Potensi ini



sekaligus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, khususnya dalam agenda pembangunan wilayah inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan utama, antara lain:

- Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni, ditandai oleh masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan keterbatasan cakupan intervensi terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Belum meratanya akses terhadap infrastruktur dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di sebagian wilayah desa dan kawasan kumuh.
- Rendahnya efektivitas pengelolaan sampah dan limbah domestik, yang ditandai oleh masih tingginya volume sampah tidak terkelola dan keterbatasan kapasitas KSM persampahan maupun TPS 3R.
- Terbatasnya koordinasi lintas sektor dan pendanaan, terutama dalam pelaksanaan program berbasis kawasan yang memerlukan sinergi multipihak.
- Isu kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan tata ruang dan perumahan, khususnya di wilayah rawan genangan, longsor, dan banjir.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu ditangani secara terstruktur melalui strategi, kebijakan, dan program yang tepat agar visi pembangunan perumahan dan lingkungan hidup yang layak, berkelanjutan, dan inklusif dapat terwujud secara nyata dalam periode 2025–2029.

Adapun Penggambaran permasalahan sebagaimana dimaksud diatas telah tertuang didalam tabel berikut :

Table 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah	Terbatasnya Infrastruktur dan Teknologi Persampahan
			Belum optimalnya pemanfaatan sampah dan limbah
			Minimnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memilah Sampah Secara Mandiri
			Belum Optimalnya Regulasi Persampahan
			Masih Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha Penghasil Limbah
		Belum Optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Minimnya Ketersediaan Lahan
			Perencanaan Tata Ruang yang Kurang Terintegrasi
			Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara RTH
			Lemahnya Penegakan Regulasi dan Pengawasan Infrastruktur RTH
			Minimnya Kolaborasi Pihak Swasta
			Belum Optimalnya Inovasi dalam Pemanfaatan Lahan Terbatas
		Belum Optimalnya Penanganan Emisi Gas Rumah Kaca	Minimnya Koordinasi dan Kebijakan Lintas Sektor
			Minimnya Data dan Inventarisasi Emisi yang Akurat
			Minimnya Kegiatan Mitigasi Lahan Kritis
			Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi



			Belum Meratanya Implementasi ProKlim di Daerah
			Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Manfaat ProKlim
			Lemahnya Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi ProKlim
		Menurunnya Keanekaragaman Hayati	Alih Fungsi Lahan dan Hilangnya Habitat Alami
			Eksplorasi Berlebihan terhadap Sumber Daya Alam
			Pencemaran Lingkungan
			Perubahan Iklim
			Minimnya Integrasi Kehati dalam Perencanaan Pembangunan
		Tingginya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Lemahnya Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum
			Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemantauan
			Lemahnya Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha
			Minimnya Peran Serta Masyarakat
			Dokumen Lingkungan Tidak Dilaksanakan Secara Nyata
			Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Limbah yang Buruk
2	Belum Optimalnya Kualitas Permukiman	Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Tidak adanya basis data RTLH yang mutakhir dan berbasis spasial
			Pendataan RTLH tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah
			RTLH banyak terdapat di kawasan rawan bencana, sempadan sungai, atau lahan tidak legal
			Minimnya Kesadaran dan Kemampuan Teknis Masyarakat
			Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor dan Lembaga



		Rendahnya Kualitas dan Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Tata Ruang yang Tidak Terintegrasi
			Belum Optimalnya Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
			Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pembangunan Permukiman
			Tidak tersedia data spasial atau database kualitas dan sebaran PSU permukiman
			Kurangnya Kapasitas Teknis dan SDM dalam Penanganan PSU
			Minimnya Sistem Pemeliharaan dan Rehabilitasi PSU
		Masih Terdapat Kawasan Permukiman Kumuh	Pertumbuhan Permukiman yang Tidak Terkendali
			Keterbatasan Akses terhadap Lahan yang Legal dan Layak
			Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Aturan Tata Ruang
			Masih Ada Backlog Perumahan
			Kurangnya Koordinasi Antar-Instansi

2.2.2. Isu Strategis

Atas berbagai gambaran situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Banjar, serta keterkaitan dengan berbagai dokumen yang terkait seperti yang telah dijabarkan pada bagian atas dari bab ini, maka bisa diketahui beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut ini:



Table 2.2.2 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
<p>IKLH Kabupaten Banjar sebesar 74,59 termasuk dalam kategori Baik : Menunjukkan bahwa secara umum kualitas udara, air, dan tutupan lahan sudah berada di tingkat yang relatif baik.</p>	<p>Belum optimalnya Pengelolaan dan Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah</p>	<p>Pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum optimal, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan limbah.</p>	<p>Perubahan Iklim dan Pemanasan Global</p>	<p>Deforestasi dan Degradasi Lahan</p>	<p>Meningkatnya Risiko Bencana Hidro-Meteorologi (Banjir, Longsor, Karhutla)</p>	<p>Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup</p>
<p>Terwujudnya Permukiman yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan : Infrastruktur yang baik</p>	<p>Belum Optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>	<p>Kondisi TPA Cahaya Kencana yang melebihi kapasitas, menunjukkan perlunya sistem</p>	<p>Kehilangan Keanekaragaman Hayati</p>	<p>Krisis Pengelolaan Sampah dan Limbah B3</p>	<p>Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Lahan Basah</p>	<p>Belum Optimalnya Kualitas Permukiman</p>



akan mengangkat kualitas permukiman, terutama di kawasan padat, rentan, dan kumuh.		pengelolaan sampah terpadu dan pengurangan sampah dari sumbernya.				
	Belum Optimalnya Penanganan Emisi Gas Rumah Kaca	Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan dan berkurangnya kawasan lindung serta ruang terbuka hijau.	Urbanisasi Berkelanjutan dan Perumahan Layak Huni	Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Indonesia.	Penyebaran kawasan permukiman informal di sekitar bantaran sungai dan lahan rawan banjir	
	Menurunnya Keanekaragaman Hayati	Peningkatan frekuensi bencana hidro-meteorologi (banjir, longsor, karhutla) akibat perubahan tata guna lahan dan kerusakan ekosistem.	Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi Layak	Kota dan permukiman rentan terhadap bencana dan perubahan iklim	Kualitas lingkungan permukiman yang rendah akibat sistem drainase dan sanitasi yang belum memadai	



	Tingginya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Meningkatnya pencemaran air dari limbah domestik, pertanian, dan industri yang belum dikelola dengan baik.				
	Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman berwawasan lingkungan				
	Rendahnya Kualitas dan Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Kegiatan pemberdayaan belum menyentuh aspek pelestarian lingkungan permukiman, seperti sanitasi berkelanjutan dan pengelolaan				



		limbah rumah tangga				
	Masih Terdapat Kawasan Permukiman Kumuh	Kapasitas kelembagaan dan pendamping teknis belum memadai untuk mendukung pengembangan permukiman yang inklusif dan ramah lingkungan				



2.2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar menghadapi berbagai isu strategis yang mendesak untuk segera direspons secara terintegrasi dan berkelanjutan. Masih tingginya angka backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keberadaan kawasan permukiman kumuh dengan akses layanan dasar yang belum memadai, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat meningkatnya timbulan sampah, limbah domestik, dan berkurangnya ruang terbuka hijau merupakan tantangan utama dalam lima tahun ke depan.

Di sisi lain, ancaman perubahan iklim dan risiko bencana yang tinggi di sejumlah wilayah, termasuk kawasan dataran rendah yang rawan genangan, menambah kompleksitas persoalan. Kondisi ini menuntut arah pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu mendorong transformasi menuju permukiman yang layak huni, tangguh terhadap bencana, dan ramah lingkungan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar turut mengambil peran strategis dalam pencapaian berbagai target SDGs yang selaras dengan mandat kewenangan daerah. Isu-isu seperti pengelolaan limbah cair, pengurangan dan pengolahan sampah, akses terhadap hunian layak, serta pengendalian emisi gas rumah kaca dan pelestarian keanekaragaman hayati menjadi bagian penting yang harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program perangkat daerah.

Oleh karena itu, indikator-indikator SDGs yang berkaitan langsung dengan perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup



menjadi referensi utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Berikut adalah uraian indikator-indikator SDGs yang relevan dan menjadi prioritas dalam lingkup kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar:

A) SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

- 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

Akses masyarakat terhadap layanan pengumpulan sampah yang menyeluruh masih menjadi tantangan di beberapa wilayah perdesaan dan kawasan padat penduduk. Peningkatan cakupan layanan, termasuk armada dan sistem logistik pengangkutan sampah, merupakan bagian dari program prioritas penguatan infrastruktur dasar kawasan permukiman.

- 11.6.1.(b) Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah

Rasio sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan masih terbatas dibanding timbulan total. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi TPS3R, pemilahan di sumber, dan pembangunan fasilitas pengolahan yang lebih adaptif di tingkat kecamatan/desa.

- 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Backlog perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masih adanya kawasan kumuh menunjukkan pentingnya strategi pembangunan hunian layak berbasis kebutuhan lokal. Intervensi pembiayaan, kolaborasi swasta, dan penguatan data spasial permukiman akan mendukung pencapaian target ini.

B) SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab



- 12.4.2 Jumlah Limbah B3 per kapita dan proporsi limbah B3 yang ditangani

Limbah B3 dari rumah tangga dan kegiatan usaha kecil menjadi perhatian seiring meningkatnya aktivitas domestik dan informal. Perlu ada sistem identifikasi, pengumpulan, dan penanganan limbah B3 yang inklusif dan berbasis komunitas.

- 12.5.1.(a) Persentase timbulan sampah yang didaur ulang

Rasio daur ulang di Kabupaten Banjar masih tergolong rendah. Edukasi masyarakat, insentif bagi pelaku pengolahan sampah, serta penyediaan infrastruktur daur ulang seperti bank sampah dan TPS3R akan menjadi prioritas intervensi lintas program.

C) SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim

- 13.2.2 Jumlah emisi GRK per tahun

Perubahan penggunaan lahan, aktivitas transportasi, serta pembakaran sampah berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (GRK). Dinas perlu mengambil peran dalam pelaporan dan pengurangan emisi, terutama dari sektor persampahan dan penggunaan energi rumah tangga.

- 13.2.2.[a] Potensi penurunan emisi GRK

Perencanaan pembangunan kawasan permukiman ramah lingkungan dan peningkatan efisiensi energi merupakan potensi utama pengurangan emisi. Hal ini juga sejalan dengan program perumahan berwawasan lingkungan.

- 13.2.2.[b] Persentase penurunan intensitas emisi GRK

Pengendalian intensitas emisi per kegiatan pembangunan dapat dicapai melalui integrasi prinsip hijau dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.



D) SDG 15: Ekosistem Daratan

- 15.1.2 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati dalam kawasan konservasi

Kawasan Pegunungan Meratus dan ekosistem rawa gambut memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Penguatan peran Dinas dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan edukasi masyarakat akan mendukung upaya konservasi secara efektif, termasuk dalam pembangunan berwawasan lingkungan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Tujuan dan sasaran berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang, sedangkan strategi dan arah kebijakan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan ini didasarkan pada isu-isu strategis serta permasalahan yang telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya, serta dari perumusan visi Kepala Daerah, sehingga mampu merespons tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan daerah

Perumusan visi mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dalam hal ini pada tahun 2029 mendatang. Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar menjadi dasar utama dalam menyusun berbagai elemen pendukung, mulai dari misi, tujuan, hingga sasaran pembangunan jangka menengah. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029 adalah:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI,
DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
DAN KEADILAN**

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

Maju: kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum



melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat.

Mandiri : kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Agamis : kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar

Gotong Royong: kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

Keadilan: kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.



Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata Kelola pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
- 2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan**
- 3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan**
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029.

Dari keempat misi di atas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi kedua, yaitu Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan,

berkeadilan dan berkelanjutan, serta misi ketiga, yaitu Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mengambil peran sebagai salah satu unsur di bidang Perumahan, Permukiman serta di urusan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjar.

3.1. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pembangunan dan pengembangan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan bersama indikator kinerjanya selama periode lima tahun.

Dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Adalah:

"Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup"

Tujuan ini dipilih karena sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029. Hal ini menunjukkan bahwa DPRKPLH memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan, khususnya pada urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.

"Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah" ini merujuk pada perbaikan mutu dan ketersediaan fasilitas dasar yang menunjang kehidupan masyarakat, seperti jalan, penerangan jalan



umum, dan drainase. Peningkatan ini tidak hanya berarti membangun yang baru, tetapi juga merawat dan memperbaiki yang sudah ada agar berfungsi lebih baik.

"Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup" ini menekankan pada upaya untuk menjaga, melestarikan, dan memperbaiki kondisi alam dan ekosistem di wilayah Kabupaten Banjar. Ini termasuk pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, pengawasan terhadap pelaku usaha terhadap izin lingkungan yang diterbitkan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan rehabilitasi lahan kritis.

3.2. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan **"Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup"**, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai bentuk konkret dari hasil antara yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan. Penetapan sasaran ini menjadi landasan utama dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan DPRKPLH, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.

Sasaran DPRKPLH secara makro adalah untuk mencapai target-target besar yang mendukung pembangunan Kabupaten Banjar secara menyeluruh. Ini mencakup peningkatan signifikan pada indikator-indikator utama seperti meningkatkan persentase permukiman layak huni, dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Sasaran makro ini menjadi kompas yang memandu seluruh kebijakan dan program DPRKPLH agar sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah.



Dengan berfokus pada sasaran makro, DPRKPLH memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih sehat dan permukiman yang lebih layak huni bagi seluruh masyarakat.

Secara mikro, sasaran tersebut dipecah menjadi target-target operasional yang spesifik dan terukur di lapangan. Misalnya, pembangunan sejumlah titik penerangan jalan umum (PJU), penanaman pohon untuk ruang terbuka hijau, pengawasan terhadap pelaku usaha, dan penyelenggaraan program edukasi pemilahan sampah di tingkat RT/RW. Sasaran mikro ini adalah implementasi nyata dari sasaran makro, yang menjadi tugas harian bagi setiap pegawai DPRKPLH. Dengan mengukur pencapaian sasaran mikro secara berkala, DPRKPLH dapat memantau efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, memastikan bahwa setiap upaya kecil akan membawa dampak besar dalam mencapai tujuan utama.

Secara garis besar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan

Indikator I : Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator II : Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indikator III : Indeks Kualitas Lahan (IKL)

2. Meningkatnya Kualitas Permukiman

Indikator : Persentase Permukiman Layak Huni

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator : Predikat Sakip Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi isu strategis dan integrasi indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, maka dirumuskanlah tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang terukur dan selaras dengan arah kebijakan daerah dalam dokumen RPJMD 2025–2029.

Tabel berikut menggambarkan kerangka teknis perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, lengkap dengan indikator kinerja serta target tahunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah:



Table 3.2.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,59	71,39	71,6	71,81	72,02	72,24	72,45	
			Indeks Infrastruktur	87.50	87.94	88.38	88.82	89.26	89.71	90.16	
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,15	71,96	72,16	72,36	72,56	72,76	72,96		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,62	71,21	71,51	71,81	72,11	72,41	72,71		
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55,5	70,73	70,8	70,87	70,94	71,01	71,08		
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah		Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	52,60%	53,98%	55,36%	57,44%	60,90%	65,05%	69,20%	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,45	82,81	84,17	85,53	86,89	88,25	89,61	

3.3. RISIKO YANG TERJADI AKIBAT TIDAK TERCAPAIANYA TUJUAN DAN SASARAN

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut berpotensi menimbulkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada efektivitas kinerja, keberlanjutan program, dan pencapaian target pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis risiko ini menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi, meminimalkan, serta mengelola potensi hambatan yang dapat mengganggu keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Berikut Tabel Analisis Risiko:

Table 3.3.1 Register Resiko Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	RISIKO PRIORITAS	PENYEBAB	DAMPAK
1	2	3	4
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
1	Terjadinya Banjir	1. Alih fungsi lahan 2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Tata Ruang yang Buruk 3. Drainase Tidak Memadai 3. Perubahan Iklim dan Curah Hujan Ekstrem	1. Kerusakan Infrastruktur dan Permukiman 2. Krisis Kesehatan dan Lingkungan
2	Sosial dan Partisipasi Masyarakat	1. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi 2. Penolakan Terhadap Perubahan	1. Program Gagal atau Tidak Berkelanjutan 2. Konflik Sosial
3	Kapasitas dan Koordinasi Internal	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi 2. Koordinasi Antar-Unsur yang Lemah	1. Inefisiensi dan Rendahnya Kualitas Program 2. Ketidakjelasan Tanggung Jawab
II	Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
1	Tidak terpenuhinya Indeks Kualitas Air	1. Pengujian dilakukan di Laboratorium lain dikarenakan Laboratorium DPRKPLH belum terakreditasi 2. Hasil uji tidak akurat dikarenakan sampel terkontaminasi	1. Target Indikator Kinerja Utama Tidak Dapat Dicapai 2. Pelaporan Terhambat 3. Perlu penambahan anggaran
2	Tidak terpenuhinya Indeks Kualitas Udara	1. Terbatasnya Laboratorium Penguji Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler 2. Kesalahan Pengiriman Hasil Uji Ke Kota yang memiliki nama sama 3. Tercecernya Alat Passive Sampler saat Pengiriman / pengembalian 4. Hasil uji tidak akurat dikarenakan sampel terkontaminasi	1. Target Indikator Kinerja Utama Tidak Dapat Dicapai 2. Pelaporan Terhambat 3. Anggaran membengkak



3	Tidak Terpenuhinya Indeks Kualitas Lahan	1. Pengujian dilakukan di Laboratorium lain dikarenakan Laboratorium DPRKPLH belum terakreditasi 2. Hasil uji tidak akurat dikarenakan sampel terkontaminasi	1. Target Indikator Kinerja Utama Tidak Dapat Dicapai 2. Pelaporan Terhambat 3. Perlu penambahan anggaran
4	Tidak tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1. Banyak Desa/Kecamatan belum menyampaikan data RTLH 2. By Name By Address tidak lengkap	1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten tidak tertangani 2. Kumuh semakin meningkat 3. Jumlah RTLH tidak berkurang sehingga target DPRKPLH tidak tercapai
5	Tidak terpenuhinya perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas	Tidak terlaksana dengan baik proses pelaksanaan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk menunjang fungsi hunian serta tidak terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	1. Tidak terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas PSU perumahan 2. Tidak terpenuhinya PSU perumahan yang layak untuk menunjang fungsi hunian 3. Sasaran Strategis SKPD tidak tercapai 4. Target Indikator Kinerja Utama 5. Capaian Target Tujuan SKPD tidak tercapai
6	Tidak Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Kantor DPRKPLH	1. Tidak Dapat Menyelenggarakan Kegiatan Perkantoran 2. Sasaran Strategis DPRKPLH Yang Lainnya Tidak Tercapai 3. Target Indikator Kinerja Utama Tidak Dapat Dicapai 4. Capaian Target Tujuan SKPD Menjadi Terhambat

3.4. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPEDALITBANG TAHUN 2025-2029

Strategi yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2025–2029 Kabupaten Banjar. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini menunjukkan bagaimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar akan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup secara terarah dan berkelanjutan, serta memastikan tercapainya target kinerja hasil (outcome) dari program-program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah.

Untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar disusun dengan pendekatan penahapan lima tahunan. Penahapan ini



mencerminkan urutan prioritas pembangunan permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup yang selaras dengan dinamika pembangunan nasional dan daerah, serta respons terhadap tantangan kualitas hunian, layanan dasar, dan daya dukung lingkungan yang semakin kompleks.

Setiap tahap dalam periode 2025–2029 dirancang untuk membangun landasan kebijakan yang kuat, memperkuat sistem penyediaan perumahan yang inklusif, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan secara terpadu dan partisipatif. Mulai dari pemantapan tata kelola dan peningkatan cakupan layanan dasar di awal periode, hingga terwujudnya permukiman yang layak huni, bebas kumuh, dan lingkungan hidup yang sehat serta berkelanjutan pada akhir periode perencanaan.

Berangkat dari tujuan dan sasaran tersebut, maka penahapan strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:



Table 3.4.1 Penahapan Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<p>Penguatan Landasan Transformasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan 2.Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Publik 3.Peningkatan Pemanfaatan Limbah 4.Peningkatan Basis Data RTLH dan Kawasan Kumuh 5.Peningkatan PSU Permukiman 6.Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan 	<p>Akselerasi Pembangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pemantauan 2.Penguatan Edukasi dan Peran Serta Masyarakat 3.Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah 4.Pemutakhiran dan Integrasi Basis Data RTLH 5.Percepatan Pembangunan PSU Berbasis Kawasan 6.Penguatan Kelembagaan Lokal dan Kapasitas SDM 	<p>Peningkatan Daya Saing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Efektivita Pemantauan Lingkungan dan Permukiman 2.Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman 3.Pengelolaan Limbah Sebagai Sumber Daya Baru 4.Ketersediaan Data Terpadu Terkait RTLH & Kawasan Kumuh untuk Kebijakan Tepat Sasaran 5.Percepatan Penataan Kawasan Kumuh dan RTLH 6.Penguatan Kapasitas Lapangan dan Kelembagaan Lokal 	<p>Pemantapan Daya Saing :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi sistem pemantauan berbasis teknologi yang terintegrasi untuk data real-time guna mendukung keputusan yang cepat dan tepat. 2. Penguatan peran serta masyarakat melalui program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan peran aktif dalam pemeliharaan infrastruktur. 3. Optimalisasi pemanfaatan limbah untuk energi dan kompos, serta pengembangan ekonomi sirkular dengan melibatkan masyarakat dan UMKM. 4. Penyusunan dan pengelolaan data yang terintegrasi untuk mempercepat perencanaan dan mendukung analisa kebijakan. 5. Pembangunan dan perbaikan PSU di kawasan kumuh dan RTLH untuk meningkatkan kualitas hidup dan nilai ekonomi kawasan. 	<p>Perwujudan Komprehensif :</p> <p>Terciptanya Pemantauan Lingkungan Yang Responsif, Partisipasi Masyarakat Yang Aktif, Pemanfaatan Limbah Yang Produktif, Data Perencanaan Yang Terintegrasi, Permukiman Yang Layak Huni, Serta SDM Dan Kelembagaan Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan.</p>



			6. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan lokal untuk mendukung pelaksanaan program berkelanjutan yang efektif dan responsif.	
--	--	--	--	--



3.5. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DPRKPLH TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar serta sebagai turunan dari arah kebijakan RPJMD dan pengoperasionalan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menetapkan arah kebijakan strategis yang terfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan hak atas hunian layak, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Air

Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan akurasi pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah, mendorong rehabilitasi daerah tangkapan air dan kawasan resapan, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas pencemar air. Di samping itu, sistem pemantauan kualitas air akan dikembangkan dengan basis data real-time pada area strategis guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

b) Peningkatan Kualitas Udara

Pengendalian pencemaran udara menjadi prioritas dengan penguatan kebijakan dan sistem pemantauan kualitas udara, serta pengendalian emisi dari sektor-sektor utama seperti transportasi, industri, dan pembakaran terbuka.

c) Peningkatan Kualitas Lahan

Kebijakan ini mencakup pengendalian alih fungsi lahan, penataan kembali pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana, revegetasi pada kawasan kritis, serta pengendalian erosi dan pencemaran tanah guna menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem lahan di wilayah Kabupaten Banjar.



d) Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Arah kebijakan diarahkan pada pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (reduce, reuse, recycle), peningkatan akses layanan pengangkutan dan pengolahan sampah, serta penguatan pengelolaan limbah B3 dari sektor rumah tangga dan industri kecil. Selain itu, literasi masyarakat dalam pengelolaan sampah akan terus ditingkatkan.

e) Peningkatan Ketaatan dan Peran Serta Masyarakat

Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan hidup. Program edukasi dan literasi lingkungan akan menyasar masyarakat di seluruh desa dan kelurahan. Masyarakat juga akan dilibatkan dalam pelaporan pengaduan serta pengawasan secara langsung terhadap kualitas lingkungan.

f) Peningkatan Rumah Layak Huni

Kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program bantuan berbasis data mutakhir, penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat, serta pengembangan model hunian yang sehat, aman, dan terjangkau. Program ini juga akan mendorong inovasi teknologi dalam pembangunan perumahan yang efisien dan berkelanjutan.

g) Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh diarahkan melalui perencanaan terpadu dan sistematis berbasis spasial. Upaya revitalisasi kawasan akan dilakukan secara menyeluruh, melibatkan kerja sama lintas perangkat daerah serta partisipasi aktif masyarakat, untuk menciptakan kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan.

h) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dinas akan mengembangkan sistem pelaporan kinerja berbasis digital dan indikator kinerja yang objektif dan terukur. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem evaluasi partisipatif,

dan transparansi pengelolaan program menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berangkat dari tujuan dan sasaran tersebut, maka arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Table 3.5.1 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kualitas Air	1. Melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur 2. Melanjutkan perbaikan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan 3. Melanjutkan penataan lingkungan permukiman yang layak huni	Meningkatkan cakupan dan akurasi pemantauan kualitas air permukaan dan tanah.	
			Mendorong rehabilitasi daerah tangkapan air dan kawasan resapan.	
			Memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pencemar air, khususnya pelaku usaha	
2	Peningkatan Kualitas Udara	1. Melanjutkan penataan lingkungan permukiman yang layak huni	Meningkatkan sistem pemantauan kualitas udara secara real-time di area strategis.	
			Mengembangkan kebijakan pengendalian emisi.	
			Mendorong penggunaan energi ramah lingkungan	
3	Peningkatan Kualitas Lahan	1. Melanjutkan penataan lingkungan permukiman yang layak huni	Menertibkan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.	
			Mengintensifkan upaya revegetasi pada lahan kritis.	
			Meningkatkan pengendalian erosi dan pencemaran tanah.	
4	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1. Melanjutkan penataan lingkungan permukiman yang layak huni	Mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R.	
			Memperluas jangkauan pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah.	



			Memastikan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha sesuai peraturan.	
5	Peningkatan Ketaatan dan Peran Serta Masyarakat		Meningkatkan literasi lingkungan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan.	
			Mengembangkan forum masyarakat peduli lingkungan di setiap desa/kelurahan.	
			Mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan lingkungan.	
			Memperkuat program bantuan peningkatan kualitas RTLH berbasis data mutakhir.	
6	Peningkatan Rumah Layak Huni		Mendorong kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan rumah layak huni.	
			Menyusun regulasi yang mendukung pemenuhan standar rumah sehat dan aman.	
			Melakukan pendataan terpadu dan pemetaan kawasan kumuh berbasis spasial.	
7	Penanganan Kawasan Kumuh		Menyusun rencana penanganan kumuh terintegrasi dengan sektor lain.	
			Mendorong kolaborasi lintas OPD dan masyarakat dalam penataan kawasan.	
			Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital dan indikator kinerja yang terukur.	
8	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja		Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil.	
			Mendorong evaluasi program yang partisipatif dan transparan.	

Selain strategi dalam bentuk tahapan pembangunan, diperlukan pula perumusan strategi kewilayahan untuk merespons dinamika pembangunan yang beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, khususnya pada tingkat kecamatan. Dalam bagian ini, akan dijabarkan strategi kewilayahan yang dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting, potensi, dan permasalahan di setiap kecamatan, serta arah kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Adapun wilayah prioritas beserta bentuk intervensi strategis yang direncanakan disajikan dalam tabel berikut:

Table 3.5.2 Lokus Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Aluh - Aluh	Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	Pengelolaan Persampahan	
2	Kecamatan Astambul	Peningkatan infrastruktur jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan	
3	Kecamatan Beruntung Baru	Pengelolaan persampahan berbasis masyarakat	Pengelolaan Persampahan	
4	Kecamatan Cintapuri Darussalam	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Sosialisasi Regulasi Daerah dan Pemberian Informasi Terkait Pencegahan Kabakaran Hutan dan Lahan	
5	Kecamatan Gambut	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Sosialisasi Regulasi Daerah dan Pemberian Informasi Terkait Pencegahan Kabakaran Hutan dan Lahan	
6	Kecamatan Martapura	Peningkatan infrastruktur jalan	Pembangunan Jalan Perumahan & Permukiman	
		Pengelolaan persampahan	Pengelolaan Persampahan	



		berbasis masyarakat		
		Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Penanganan RTLH	
7	Kecamatan Martapura Barat	Peningkatan infrastruktur jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan	
		Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Sungai	Penanaman Disekitar Aliran Sungai, Pemantauan Kualitas Air	
8	Kecamatan Martapura Timur	Peningkatan infrastruktur jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan	
		Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem Sungai	Penanaman Disekitar Aliran Sungai, Pemantauan Kualitas Air	
9	Kecamatan Pengaron	Peningkatan upaya rehabilitasi lingkungan	Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan	
10	Kecamatan Sambung Makmur	Peningkatan pengelolalan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
11	Kecamatan Simpang Empat	Peningkatan pengelolalan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
12	Kecamatan Sungai Pinang	Peningkatan pengelolalan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
13	Kecamatan Sungai Tabuk	Peningkatan infrastruktur jalan	Pembangunan Jalan Lingkungan	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun dan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai bentuk operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Setiap program dirancang untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah, serta diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Penjabaran program ke dalam kegiatan dan subkegiatan dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan mengacu pada standar pelayanan minimal, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Setiap unit pelaksana bertanggung jawab terhadap capaian kinerja yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dibebankan.

Bab ini menyajikan uraian mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun ke depan, berikut dengan indikator kinerja, target capaian, serta hubungan logis dengan sasaran strategis perangkat daerah. Penyajian ini diharapkan menjadi dasar bagi pelaksanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan

Dalam proses penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan memperhatikan hasil forum perangkat daerah – renstra yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 28 bulan April Tahun 2025 lalu. Didalam berita acara tersebut telah dimuat dan dibahas terkait Program yang akan dikerjakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam Periode 2025 – 2029.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar memiliki empat belas program, adapun program-program yang akan dilaksanakan selama satu periode ini adalah sebagai berikut :

- a) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- b) Program Pengelolaan Persampahan
- c) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- e) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- f) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- g) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- h) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- i) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- j) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- k) Program Pengembangan Perumahan
- l) Program Kawasan Permukiman
- m) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- n) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan program-program diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mendukung penuh Program Nasional yakni Pembangunan Tiga Juta Rumah yang fokus dalam mengatasi backlog perumahan. Selain itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup juga menjadikan Program Pengelolaan Sampah sebagai salah satu Program Prioritas guna mendukung Program Nasional Terkait isu Persampahan.



4.1. URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2029

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menetapkan sejumlah program prioritas yang disesuaikan dengan peran, fungsi, serta mandat kewenangan perangkat daerah. Program-program tersebut disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, melalui sasaran pembangunan yang bersifat terukur, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

Sebagaimana prinsip dalam RPJMD, perencanaan program dilandasi oleh pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial, yang berarti bahwa setiap intervensi Dinas harus mempertimbangkan keterpaduan antarsektor, keterhubungan wilayah, serta kesinambungan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, program dan kegiatan Dinas tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik perumahan dan permukiman semata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar, penurunan kawasan kumuh, pengendalian pencemaran lingkungan, dan penguatan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan merupakan turunan langsung dari tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, yang telah disejajarkan dan disinergikan dengan indikator makro dalam RPJMD, termasuk indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indikator ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dokumen penetapan kinerja, laporan kinerja (LKjIP), serta evaluasi dan pengendalian capaian kinerja. Penetapan indikator dilakukan secara hati-hati, akurat, dan transparan, guna menjamin



bahwa data yang dihasilkan valid, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Melalui pendekatan ini, program-program Dinas diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam RPJMD, seperti: tingginya angka backlog perumahan, rendahnya cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah, belum optimalnya ruang terbuka hijau, dan masih adanya kawasan permukiman dengan kualitas lingkungan rendah. Penataan program juga mencerminkan upaya percepatan transformasi kelembagaan, penguatan kolaborasi lintas sektor dan desa, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pembangunan yang adaptif dan berdaya saing.

Adapun hasil penyusunan dan penataan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Table 4.1.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
					Indeks Infrastruktur		
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan			Indeks Kualitas Air (IKA)		
					Indeks Kualitas Udara (IKU)		
					Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
			Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran/ dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase Lokasi Udara Ambien Memenuhi Baku Mutu		



				Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Parameter Udara Ambien yang Dipantau		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
						Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
						Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	
						Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
				Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	



						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
				Meningkatnya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	
			Menurunnya Sampah yang Dibuang Ke TPA		Persentase Sampah Dibuang Ke TPA	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah	Pengelolaan Sampah (UPTD-Persampahan)	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
						Penanganan sampah melalui pemrosesan	



						akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
						Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
				Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	Pengelolaan Sampah	
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah		
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
						Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	
						Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	
				Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi		
						Penanganan sampah melalui pengangkutan	
						Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
						Penanganan sampah melalui pemilahan	



						dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	
			Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3		Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Penyimpanan sementara Limbah B3	
						Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui	



						Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
				Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3		
						Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
				Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan		



					Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum		
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
						Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
						Pengelolaan Pengaduan	



						permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
						Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Kajian Hidup Lingkungan Strategis	Persentase Dokumen KLHS Yang Tersedia	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
						Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan		Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT	



						HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Hukum Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
						Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan		Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Tutupan Lahan		Persentase Tutupan Lahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau		Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau		
				Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten		
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	



		Meningkatnya Kualitas Permukiman			Persentase Permukiman Layak Huni		
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman		Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
				Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar		
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
						Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru		
						Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke Pemerintah Daerah	Persentase PSU yang Diserahterimakan		



						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
			Meningkatnya Rumah Layak Huni		Persentase Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Tertanganinya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
				Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	
						Koordinasi dan Sinkronisasi	



						Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman		Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
				Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
				Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar		
				Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	



						Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman		Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
				Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	



						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan	



						Perubahan DPA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamatan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



Melalui perumusan yang telah dijabarkan di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar berkomitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang dan dilaksanakan didasarkan pada landasan perencanaan yang kokoh, terukur, dan bersifat transparan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil sejalan dan terintegrasi secara langsung dengan pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, pendekatan perencanaan yang diterapkan tidak sekadar bersifat administratif atau normatif, melainkan secara nyata ditujukan untuk menjawab dan menyelesaikan isu-isu strategis serta permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat tapak.

Dengan demikian, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tidak hanya mengedepankan prosedur perencanaan yang sistematis dan berbasis data, tetapi juga menjadikan perencanaan sebagai instrumen utama dalam menciptakan perubahan yang signifikan, inklusif, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya, uraian rinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif untuk masing-masing item, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Table 4.1.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan Lingkungan Hidup	Kinerja	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Peren- canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Tahun 2030		Unit Kerja Parangkat Daerah Penanggun- g Jawab
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					85,555,726,698		112,937,346,596		114,995,710,000		118,439,494,000		120,257,886,000		122,917,576,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74.59	71.39	35,608,396,415	71.6	43,416,738,596	71.81	44,016,172,000	72.02	45,446,763,000	72.24	46,291,640,000	72.45	47,039,226,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Indeks Infrastruktur	87.50	87.94	49,947,330,283	88.38	69,520,608,000	88.82	70,979,538,000	89.26	72,992,731,000	89.71	73,966,246,000	90.16	75,878,350,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan		Indeks Kualitas Air (IKA)	64.15	71.96	30,552,238,600	72.16	34,784,802,596	72.36	35,217,379,000	72.56	36,412,961,000	72.76	37,152,171,000	72.96	37,678,582,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	94.62	71.21		71.51		71.81		72.11		72.41		72.71		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	55.5	70.73	5,056,157,815	70.8	8,631,936,000	70.87	8,798,793,000	70.94	9,033,802,000	71.01	9,139,469,000	71.08	9,360,644,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan



																Lingkungan Hidup					
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Lokasi Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu	100%	100%	1,683,548,300	100%	2,592,389,000	100%	2,202,677,000	100%	2,266,460,000	100%	2,356,262,000	100%	2,490,615,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
					Persentase Lokasi Udara Memenuhi Baku Mutu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
2	11	03	2	01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemantauan Kualitas Air dan Udara	Parameter Air yang Dipantau	38	38	1,018,344,300	38	1,580,834,000	38	1,783,325,750	38	1,861,747,000	38	2,007,725,000	38	2,193,644,750	Bidang P2KL
						Parameter Udara Ambien yang Dipantau	3	3	3		3		3		3		Bidang P2KL				
2	11	03	2	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	35 Kegiatan	40 Kegiatan	157,580,000	45 Kegiatan	50 Kegiatan	224,452,000	55 Kegiatan	60 Kegiatan	285,936,000	65 Kegiatan	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



2	11	03	2	01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau)	19 Lokasi	19 Lokasi	122,454,000	19 Lokasi	117,815,755	19 Lokasi	146,944,800	19 Lokasi	171,435,600	19 Lokasi	180,926,400	19 Lokasi	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2	01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Beroperasi dan berfungsi ya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	328,311,000	1 Unit	501,840,000	1 Unit	542,087,283	1 Unit	555,359,653	1 Unit	589,988,673	1 Unit	630,390,723	Bidang P2KL
2	11	03	2	01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	n/a Paket	0 Paket	-	1 Paket	118,950,000	1 Paket	118,950,000	1 Paket	118,950,000	1 Paket	118,950,000	1 Paket	118,950,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2	01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengujian di laboratorium	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh	35 Dokumen	40 Dokumen	409,999,300	45 Dokumen	638,518,245	50 Dokumen	750,891,667	55 Dokumen	750,807,747	60 Dokumen	831,923,927	65 Dokumen	944,304,027	UPTD - Lab Lingkungan / Bidang P2KL



	kabupaten/ kota	m lingkungan	laboratorium lingkungan														
		Meningkat nya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	53	18	333,161,000	10	431,371,000	10	439,824,000	10	446,620,000	10	388,553,000	12	320,624,000	Bidang P2KL
		Terlaksana nya Penyusuna n Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1	1	333,161,000	1	431,371,000	1	439,824,000	1	446,620,000	1	388,553,000	1	320,624,000	Bidang P2KL
2 11 03 2 01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Pengendali an Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksana nya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksana an Pengendali an Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokum en	1 dokum en	333,161,000	1 dokum en	431,371,000	1 dokum en	439,824,000	1 dokum en	446,620,000	1 dokum en	388,553,000	1 dokumen	320,624,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 03 2 02	Penanggula ngan Pencemara n dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkat nya Pembinaan Komunitas Kampung Iklim	Jumlah Komunitas Kampung Iklim Yang Dibina	53	18	252,518,000	10	200,659,000	10	200,659,000	10	200,659,000	10	200,659,000	12	200,659,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 03 2 02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemara n dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksana nya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemara n dan/atau Kerusakan Lingkunga n Hidup pada	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Lapora n	1 Lapora n	252,518,000	1 Lapora n	200,659,000	1 Lapora n	200,659,000	1 Lapora n	200,659,000	1 Lapora n	200,659,000	1 Laporan	200,659,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		Masyarakat di Kabupaten/Kota	di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan															
2	11	03	2	03														Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2	03	0007													Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11																Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01														UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3
																		UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3



			TPA/TPST Regional																			
2	11	11	2	01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	7	1,213,190,000	4	1,213,190,000	4	650,000,000	4	56,633,000	4	113,266,000	4	113,266,000	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3
2	11	11	2	01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	31025	29200	3,973,246,500	27375	3,973,246,500	25550	4,066,613,500	23725	4,066,613,500	21900	4,066,613,500	20075	4,066,613,500	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3
2	11	11	2	01	0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	0	1	750,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	UPTD - Persampahan / Bidang PSLB3
2	11	11	2	01		Pengelolaan Sampah	Optimalnya Fungsi Lembaga Pengelolaan Sampah	Persentase Kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Aktif	n/a	50.00 %	836,000,000	81.48 %	857,000,000	88.76 %	880,000,000	92.04 %	900,000,000	94.92 %	1,000,000,000	100.00 %	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		Terbentuknya Bank Sampah Induk	Jumlah Bank Sampah Induk Yang Terbentuk	n/a	1	836,000,000	2	857,000,000	5	880,000,000	10	900,000,000	15	1,000,000,000	20	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Terbentuknya Bank Sampah Unit	Jumlah Bank Sampah Unit Yang Terbentuk	n/a	34	836,000,000	50	857,000,000	50	880,000,000	50	900,000,000	50	1,000,000,000	40	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelolaan Sampah	Jumlah KSM Yang Terbentuk	n/a	25	836,000,000	50	857,000,000	50	880,000,000	50	900,000,000	50	1,000,000,000	40	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2 11 11 2 01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	87	4	836,000,000	34	857,000,000	34	880,000,000	34	900,000,000	34	1,000,000,000	33	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kesadaran Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Rumah Tangga Sebagai Nasabah Lembaga Pengelolaan Sampah	40.00 %	50.00 %	500,000,000	60.00 %	700,000,000	70.00 %	520,000,000	80.00 %	550,000,000	90.00 %	570,000,000	100.00 %	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Terbentuknya Regulasi Persampahan	Jumlah Dokumen Regulasi Sampah	0	1	500,000,000	1	700,000,000	1	520,000,000	1	550,000,000	1	570,000,000	2	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah Di Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Sebagai Peserta Sosialisasi	n/a	2,000	500,000,000	2000	700,000,000	4000	520,000,000	2000	550,000,000	2000	570,000,000	2000	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
2	11	11	2	01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	1	500,000,000	1	500,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	2	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
2	11	11	2	01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	0	0	-	1	200,000,000	1	220,000,000	1	230,000,000	1	240,000,000	1	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	0	0	-	0	-	1	200,000,000	1	220,000,000	1	230,000,000	1	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Optimalnya Pengurangan Sampah	Persentase Sampah Yang Dikurangi	28.51 %	32.75 %	20,100,539,000	39.41 %	22,912,147,096	47.32 %	24,131,550,500	56.45 %	25,509,533,500	68.10 %	25,708,168,500	72.79%	26,063,651,500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya Proses Pemilahan Sampah	Jumlah Sampah Terpilah	n/a	42668	16,100,539,000	66871	17,100,539,000	88365	19,131,550,500	106566	19,509,533,500	121085	18,708,168,500	135885	18,063,651,500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



2	11	11	2	01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	58400	54750	16,100,539,000	51100	15,600,539,000	47450	17,631,550,500	43800	18,009,533,500	40150	17,208,168,500	36500	16,563,651,500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	n/a	0.00%	-	81.48%	1,000,000,000	88.76%	1,000,000,000	92.04%	1,000,000,000	94.92%	1,000,000,000	100.00%	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2	01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLT Sa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-an	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLT Sa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-an	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLT Sa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-an	n/a	n/a	-	19162.5	500,000,000	17885	500,000,000	16607.5	500,000,000	15330	500,000,000	14052.5	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Tersedianya Sarpras Pemilahan & Pengolahan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemilahan dan Pengolahan Sampah	n/a	3	4,000,000,000	5	5,811,608,096	5	5,000,000,000	5	6,000,000,000	7	7,000,000,000	7	8,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		Tersedia Sarpras Pengumpulan & Pengangkutan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah	n/a	15	4,000,000,000	20	5,811,608,096	25	5,000,000,000	30	6,000,000,000	35	7,000,000,000	40	8,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
2	11	11	2	01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedia Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0	15	4,000,000,000	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
2	11	11	2	01	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Tersedia Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	0	0	-	15	5,811,608,096	15	5,000,000,000	15	6,000,000,000	15	7,000,000,000	15	8,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAHA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAHA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengelola Limbah B3 Dengan Baik	35.71 %	46.43 %	199,280,000	57.14 %	221,530,000	67.86 %	225,812,000	78.57 %	231,843,000	89.29 %	234,555,000	100.00%	240,231,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



2	11	5	2	01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Rincian Teknis dan/atau Persetujuan Teknis	35.71	46.43 %	199,280,000	57.14 %	92,870,000	67.86 %	93,956,000	78.57 %	96,946,000	89.29 %	97,568,000	100.00%	99,288,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Rintek dan/atau Pertek	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rintek dan/atau Pertek	50	15	199,280,000	15	92,870,000	15	93,956,000	15	96,946,000	15	97,568,000	15	99,288,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Terlaksananya Verifikasi Persetujuan Rintek dan/atau Pertek	Jumlah Verifikasi Persetujuan Rintek dan/atau Pertek	50	15	199,280,000	15	92,870,000	15	93,956,000	15	96,946,000	15	97,568,000	15	99,288,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	05	2	01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	118,660,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



2	11	05	2	01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Terfasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1	1	80,620,000	1	92,870,000	1	93,956,000	1	96,946,000	1	97,568,000	1	99,288,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3	55%	63%	-	71%	128,660,000	79%	131,856,000	86%	134,897,000	94%	136,987,000	100%	140,943,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha Penghasil Limbah B3 Yang Dibina	0	0	-	17	128,660,000	17	131,856,000	18	134,897,000	18	136,987,000	18	140,943,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	05	2	01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	0	-	15	128,660,000	15	131,856,000	15	134,897,000	15	136,987,000	15	140,943,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		sementara limbah B3																				
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100%	100%	503,083,500	100%	316,804,000	100%	322,928,000	100%	331,553,000	100%	335,431,000	100%	343,548,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
2	11	06	2	01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	Persentase Dokumen Persetujuan Lingkungan yang sesuai dengan Perundangan	100.00 %	100.00 %	203,083,500	100.00 %	156,804,000	100.00 %	132,928,000	100.00 %	141,553,000	100.00 %	145,431,000	100.00 %	153,548,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	06	2	01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	16 Dokumen	15 Dokumen	203,083,500	15 Dokumen	156,804,000	15 Dokumen	132,928,000	15 Dokumen	141,553,000	15 Dokumen	145,431,000	15 Dokumen	153,548,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		Kelayakan Operasi yang Diberikan																			
		Meningkatnya Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pengawasan dan/atau Penegakkan Hukum	100.00 %	100.00 %	300,000,000	100.00 %	160,000,000	100.00 %	190,000,000	100.00 %	190,000,000	100.00 %	190,000,000	100.00 %	190,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
2	11	06	2	01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	10	10	100,000,000	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
2	11	06	2	01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	6 Orang	100,000,000	3 Orang	60,000,000	3 Orang	60,000,000	3 Orang	60,000,000	3 Orang	60,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	06	2	01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	30	100,000,000	33	100,000,000	33	130,000,000	33	130,000,000	33	130,000,000	33	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



	undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota yang diawasi																
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	100%	100%	153,571,800	100%	269,715,000	100%	274,929,000	100%	282,272,000	100%	285,574,000	100%	292,485,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2 11 10 2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Penanganan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100.00 %	100.00 %	153,571,800	100.00 %	269,715,000	100.00 %	274,929,000	100.00 %	282,272,000	100.00 %	285,574,000	100.00%	292,485,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2 11 10 2 01 0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5	5	50,000,000	5	80,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



		kabupaten/kota																				
2	11	10	2	01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10	7	68,571,800	7	118,571,800	8	139,929,000	9	147,272,000	10	150,574,000	10	157,485,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	10	2	01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	1	35,000,000	1	71,143,200	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan Hidup Yang Tersedia	100%	100%	195,999,700	100%	265,000,000	100%	470,123,000	100%	732,680,000	100%	991,250,000	100%	565,238,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



2	11	02	2	01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Yang Terencana	100%	100%	195,999,700	100%	265,000,000	100%	220,123,000	100%	482,680,000	100%	391,250,000	100%	265,238,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
2	11	02	2	01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	1 Dokumen	195,999,700	2 Dokumen	265,000,000	1 Dokumen	220,123,000	1 Dokumen	482,680,000	1 Dokumen	391,250,000	1 Dokumen	265,238,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
2	11	02	2	02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Hidup Lingkungan Strategis	Persentase Dokumen KLHS Yang Tersedia	100%	0	-	0	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	600,000,000	100%	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
2	11	02	2	02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1 Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1	1 Dokumen	300,000,000	0	-	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup			
2	11	02	2	02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0	0	-	0	-	1	1 Dokumen	250,000,000	1	1 Dokumen	250,000,000	1	1 Dokumen	300,000,000	1	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



2	11	07																Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100%	100%	162,245,400	100%	172,246,000	100%	175,576,000	100%	180,266,000	100%	182,375,000	100%	186,788,000
2	11	07	2	01														Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Masyarakat Adat	Terbentuknya Masyarakat Hukum Adat	0	1	162,245,400	1	172,246,000	1	175,576,000	1	180,266,000	1	182,375,000	1	186,788,000
2	11	07	2	01	0001													Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	162,245,400	1	172,246,000	1	175,576,000	1	180,266,000	1	182,375,000	1	186,788,000



2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Persentase Partisipasi Masyarakat Peduli Lingkungan	100%	100%	281,534,400	100%	291,535,000	100%	297,170,000	100%	305,107,000	100%	308,676,000	100%	316,146,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	08	2	01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pembinaan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah	Persentase Sekolah Yang Terbina	100%	100%	281,534,400	100%	291,535,000	100%	297,170,000	100%	305,107,000	100%	308,676,000	100%	316,146,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	08	2	01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Gerakan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	281,534,400	1	291,535,000	1	297,170,000	1	305,107,000	1	308,676,000	1	316,146,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Tutupan Lahan	Persentase Tutupan Lahan	0.37%	0.40%	592,926,215	0.43%	595,926,215	0.45%	598,926,215	0.47%	601,926,215	0.50%	604,926,215	0.52%	607,926,215	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	04	2	01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengelolaan Lahan Keanekaragaman Hayati	Luas Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	7.82 Ha	7.82 Ha	592,926,215	7.82 Ha	595,926,215	7.82 Ha	598,926,215	7.82 Ha	601,926,215	7.82 Ha	604,926,215	7.82 Ha	607,926,215	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



		Terselenggara Kegiatan Rehabilitasi Lahan Di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Lahan Di Luar Kawasan Hutan	0	360 Kegiatan	592,926,215	360 Kegiatan	595,926,215	360 Kegiatan	598,926,215	360 Kegiatan	601,926,215	360 Kegiatan	604,926,215	360 Kegiatan	607,926,215	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
		Meningkatnya Penanaman Pohon di Luar Kawasan Hutan	Persentase Tingkat Hidup Pohon Yang Ditanam	0%	70%	592,926,215	70%	595,926,215	70%	598,926,215	70%	601,926,215	70%	604,926,215	70%	607,926,215	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
2	11	04	2	01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 Orang	1 Org	46,814,000	1 Org	47,814,000	1 Org	48,814,000	1 Org	49,814,000	1 Org	50,814,000	1 Org	51,814,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04	2	01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,5 Unit	1 Unit	246,118,000	1 Unit	247,118,000	1 Unit	248,118,000	1 Unit	249,118,000	1 Unit	250,118,000	1 Unit	251,118,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04	2	01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7.82 Ha	1 Unit	299,994,215	1 Unit	300,994,215	1 Unit	301,994,215	1 Unit	302,994,215	1 Unit	303,994,215	1 Unit	304,994,215	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Luas Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	15,79 Ha	17,09 Ha	4,463,231,600	18 Ha	8,036,009,785	19 Ha	8,199,866,785	20 Ha	8,431,875,785	21 Ha	8,534,542,785	22 Ha	8,752,717,785	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



2	11	04	2	01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Persentase Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	100%	100%	4,463,231,600	100%	8,036,009,785	100%	8,199,866,785	100%	8,431,875,785	100%	8,534,542,785	100%	8,752,717,785	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun & Terpelihara Di Kabupaten	100%	100%	4,463,231,600	100%	8,036,009,785	100%	8,199,866,785	100%	8,431,875,785	100%	8,534,542,785	100%	8,752,717,785	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terbangun	0	3	4,463,231,600	2	8,036,009,785	2	8,199,866,785	2	8,431,875,785	2	8,534,542,785	2	8,752,717,785	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						Terlaksananya Pemeliharaan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	33	36	4,463,231,600	38	8,036,009,785	40	8,199,866,785	42	8,431,875,785	44	8,534,542,785	46	8,752,717,785	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2	11	04	2	01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15,79 Ha	17,09 Ha	4,463,231,600	18 Ha	8,036,009,785	19 Ha	8,199,866,785	20 Ha	8,431,875,785	21 Ha	8,534,542,785	22 Ha	8,752,717,785	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Permukiman							Persentase Permukiman Layak Huni	52.60 %	53.98 %	33,022,313,200	55.36 %	47,990,477,000	57.44 %	49,033,224,000	60.90 %	50,460,247,000	65.05 %	51,170,203,000	69.20%	52,530,644,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1	4	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	53.22 %	54.60 %	25,064,344,100	55.99 %	30,652,348,000	58.06 %	31,359,945,000	61.52 %	32,314,928,000	65.67 %	32,812,641,000	69.83%	33,728,829,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



		UMUM (PSU)																			
1	4	05	2	01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	21.39 %	26.87 %	6,889,823,000	36.01 %	8,889,823,000	40.40 %	9,789,823,000	45.70 %	10,689,823,000	51.92 %	10,189,823,000	59.05%	11,189,823,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	21.39 %	22.30 %		23.58 %		25.23 %		27.24 %		29.62 %		32.36%		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perencanaan Jalan Lingkungan	20	30		50		74		103		137		176		
						Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	20	30		50		74		103		137		176		
						Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Drainase	Jumlah Perencanaan Drainase	1	5		7		9		11		13		15		
						Terlaksananya Perbaikan Drainase	Jumlah Perbaikan Drainase	1	5		7		9		11		13		15		

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



1	4	05	2	01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup				
1	4	05	2	01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	11 Lokasi	31 Lokasi	6,864,823,000	25 Lokasi	8,864,823,000	34 Lokasi	9,764,823,000	38 Lokasi	10,664,823,000	42 Lokasi	10,164,823,000	46 Lokasi	11,164,823,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Meningkatnya Kelengkapan PJU Permukiman	Jumlah Titik PJU yang Dipelihara Dan Pasang Baru	100%	17 Dokumen	17,874,521,100	32 Dokumen	21,462,525,000	33 Dokumen	21,270,122,000	34 Dokumen	21,325,105,000	35 Dokumen	22,322,818,000	36 Dokumen	22,239,006,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	05	2	01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	100%	17 Dokumen	17,874,521,100	20 Dokumen	18,374,521,100	21 Dokumen	18,742,011,522	22 Dokumen	19,116,851,752	23 Dokumen	19,499,188,788	24 Dokumen	19,889,172,564	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	05	2	01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0 Lokasi	0 Lokasi	-	12 Lokasi	3,088,003,900	12 Lokasi	2,528,110,478	12 Lokasi	2,208,253,248	12 Lokasi	2,823,629,212	12 Lokasi	2,349,833,436	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Meningkatnya Serah Terima PSU oleh Pengembang Ke	Persentase PSU yang Diserahkan	22 Laporan	3.66%	300,000,000	7.31%	300,000,000	10.97%	300,000,000	14.63%	300,000,000	18.28%	300,000,000	21.94%	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



		Pemerintah Daerah															Lingkungan Hidup		
			Terlaksananya Verifikasi PSU yang Akan Diserahterimakan Oleh Pengembangan	Jumlah PSU yang Diverifikasi	30 Dokumen	10 Dokumen	300,000,000	10 Dokumen	300,000,000	10 Dokumen	300,000,000	10 Dokumen	300,000,000	10 Dokumen	300,000,000	10 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1 4 05 2 01 0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	30 Dokumen	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	300,000,000	20 Laporan	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 4 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	76.75 %	76.95 %	865,566,300	77.15 %	993,196,000	77.35 %	1,012,395,000	77.55 %	1,039,435,000	77.75 %	1,051,593,000	77.96%	1,077,042,000	77.96%	1,077,042,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 4 02 2 01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tertangannya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100.00 %	100.00 %	200,000,000	100.00 %	200,000,000	100.00 %	200,000,000	100.00 %	200,000,000	100.00 %	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 4 02 2 01 0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat	1 Dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



		Kerusakan Rumah	Kerusakan Rumah																
1 4 02 2 01 0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Dokumen Data perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 4 02 2 03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Tertangannya Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase Rumah Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah Yang Tertangani	100.00 %	100.00 %	400,000,000	100.00 %	502,629,700	100.00 %	512,395,000	100.00 %	539,435,000	100.00 %	551,593,000	100.00 %	577,042,000		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1 4 02 2 03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	312	16	400,000,000	16	402,629,700	16	412,395,000	17	439,435,000	18	451,593,000	19	477,042,000		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1 4 02 2 03 0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	0	0	-	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1 4 02 2 06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	Persentase Perumahan Yang Dibangun Sesuai Dengan Siteplan	100.00 %	100.00 %	265,566,300	100.00 %	290,566,300	100.00 %	300,000,000	100.00 %	300,000,000	100.00 %	300,000,000	100.00 %	300,000,000		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



1	4	02	2	06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen	50 Dokumen	122,119,000	50 Dokumen	150,000,000	50 Dokumen	150,000,000	50 Dokumen	150,000,000	50 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
1	4	02	2	06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	143,447,300	1 Laporan	140,566,300	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
1	4	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	53.22 %	54.60 %	3,709,071,800	55.99 %	9,275,539,000	58.06 %	9,454,837,000	61.52 %	9,707,369,000	65.67 %	9,820,915,000	69.83%	10,058,581,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	03	2	02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanganan Permukiman	5 Dok	4 Dok	962,649,115	4 Dok	745,774,115	4 Dok	780,351,527	4 Dok	817,586,679	4 Dok	857,729,347	4 Dok	901,053,961	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



1	4	03	2	02	0008	Penyusunan/Review/Leгалisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Telegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Telegalisasi	2 Dok	2 Dok	766,875,000	2 Dok	500,000,000	2 Dok	510,000,000	2 Dok	520,200,000	2 Dok	530,604,000	2 Dok	541,216,080	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	03	2	02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	3 Dok	2 Dok	195,774,115	2 Dok	245,774,115	2 Dok	270,351,527	2 Dok	297,386,679	2 Dok	327,125,347	2 Dok	359,837,881	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	03	2	03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	0.00%	0.89%	2,746,422,685	1.75%	8,529,764,885	2.61%	8,674,485,474	3.47%	8,889,782,321	4.34%	8,963,185,653	5.20%	9,157,527,039	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	03	2	03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0%	0%	-	50 Unit	1,250,000,000	50 Unit	1,250,000,000	50 Unit	1,250,000,000	50 Unit	1,250,000,000	50 Unit	1,250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Jalan Lingkungan Permukiman Sesuai Standar	21.39 %	26.87 %	2,746,422,685	36.01 %	7,279,764,885	40.40 %	7,424,485,474	45.70 %	7,639,782,321	51.92 %	7,713,185,653	59.05%	7,907,527,039	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							Meningkatnya Kualitas Drainase Permukiman Sesuai Standar	Persentase Titik Drainase Permukiman Sesuai Standar	21.39 %	22.30 %		23.58 %		25.23 %		27.24 %		29.62 %		32.36%		Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



		Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perencanaan Jalan Lingkungan	20	30		50		74		103		137		176							
		Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Jumlah Perbaikan Jalan Lingkungan	20	30		50		74		103		137		176							
		Terlaksananya Perencanaan Perbaikan Drainase	Jumlah Perencanaan Drainase	1	5		7		9		11		13		15							
		Terlaksananya Perbaikan Drainase	Jumlah Perbaikan Drainase	1	5		7		9		11		13		15							
1	4	03	2	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Dokumen	3 Dok	195,774,000	3 Dok	604,764,885	3 Dok	579,000,000	2 Dok	350,000,000	2 Dok	350,000,000	3	544,341,385	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	03	2	03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	2 Ha	2,550,648,685	2.6 Ha	6,675,000,000	3 Ha	6,845,485,474	3.5 Ha	7,289,782,321	3.5 Ha	7,363,185,653	3.5 Ha	7,363,185,654	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Memiliki Kelengkapan PSU Minimal	53.22 %	54.60 %	3,383,331,000	55.99 %	7,069,394,000	58.06 %	7,206,047,000	61.52 %	7,398,515,000	65.67 %	7,485,054,000	69.83%	7,666,192,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1	4	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	Persentase RTLH yang Ditangani Sesuai Standar	0.00%	0.89%	3,308,331,000	1.75%	6,994,394,000	2.61%	7,129,547,000	3.47%	7,320,485,000	4.34%	7,405,463,400	5.20%	7,585,009,588	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	04	2	01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	8269	115	3,108,331,000	224	6,784,394,000	251	6,915,347,000	258	7,102,001,000	261	7,182,609,800	268	7,357,698,988	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	04	2	01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	0 Unit	4	200,000,000	4	210,000,000	4	214,200,000	4	218,484,000	4	222,853,600	4	227,310,600	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1	4	04	2	01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembangunan Rumah Sesuai Standar	Persentase Masyarakat yang Memahami Standar Permukiman Layak	30.00 %	35.00 %	75,000,000	40.00 %	75,000,000	45.00 %	76,500,000	50.00 %	78,030,000	55.00 %	79,590,600	60.00 %	81,182,412	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1	4	04	2	01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5 Laporan	100 Orang	75,000,000	100 Orang	75,000,000	100 Orang	76,500,000	100 Orang	78,030,000	100 Orang	79,590,600	100 Orang	81,182,412	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.45	82.81	16,925,017,083	84.17	21,530,131,000	85.53	21,946,314,000	86.89	22,532,484,000	88.25	22,796,043,000	89.61	23,347,706,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1	4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	80.00 %	81	16,925,017,083	82	21,530,131,000	83	21,946,314,000	84	22,532,484,000	84.50	22,796,043,000	85	23,347,706,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1	4	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100.00 %	100.00 %	100,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00 %	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	



1	4	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	3	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedia Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedia Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedia Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedia Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1	4	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	35,000,000	16	35,000,000	16	35,000,000	16	35,000,000	16	35,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	20	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1	4	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
1	4	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan sesuai ketentuan	100.00 %	100.00 %	11,196,626,657	100.00 %	15,801,740,574	100.00 %	14,667,923,574	100.00 %	15,204,093,574	100.00 %	15,417,652,574	100.00 %	15,919,315,574	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82	180	10,661,626,657	180	15,266,740,574	180	14,132,923,574	180	14,669,093,574	180	14,882,652,574	180	15,384,315,574	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1	4	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	10,000,000	18	10,000,000	18	10,000,000	18	10,000,000	18	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan	100%	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	5,000,000	8	5,000,000	8	5,000,000	8	5,000,000	8	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	100%	100%	149,999,600	100%	299,999,600	100%	299,999,600	100%	299,999,600	100%	299,999,600	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



1	4	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
1	4	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	29,999,600	40	29,999,600	40	29,999,600	40	29,999,600	40	29,999,600	40	29,999,600	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	100,000,000	25	250,000,000	25	250,000,000	25	250,000,000	25	250,000,000	25	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas	100%	100%	1,137,867,300	100%	1,142,867,300	100%	1,142,867,300	100%	1,142,867,300	100%	1,142,867,300	100%	1,142,867,300	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	31,993,500	1	31,993,500	1	31,993,500	1	31,993,500	1	31,993,500	1	31,993,500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	1	6,993,500	1	6,993,500	1	6,993,500	1	6,993,500	1	6,993,500	1	6,993,500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan



			Tangga yang Disediakan																Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1	4	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	20,392,500	1	20,392,500	1	20,392,500	1	20,392,500	1	20,392,500	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	2	17,994,000	2	17,994,000	2	17,994,000	2	17,994,000	2	17,994,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	5	6,494,000	5	6,494,000	5	6,494,000	5	6,494,000	5	6,494,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	500	1,044,999,800	500	1,044,999,800	500	1,044,999,800	500	1,044,999,800	500	1,044,999,800	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	560,526,000	100%	1,560,526,000	100%	3,060,526,000	100%	3,060,526,000	100%	3,060,526,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR 2025-2029



1	4	01	2	07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
1	4	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000	3	1,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103	103	107,698,000	103	107,698,000	103	107,698,000	103	107,698,000	103	107,698,000	103	107,698,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87	87	452,828,000	87	452,828,000	87	452,828,000	87	452,828,000	87	452,828,000	87	452,828,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang berkualitas	100%	100%	3,039,418,526	100%	1,884,418,526	100%	1,934,418,526	100%	1,984,418,526	100%	2,034,418,526	100%	2,084,418,526	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2,190,000	12	2,190,000	12	2,190,000	12	2,190,000	12	2,190,000	12	2,190,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan



																		Lingkungan Hidup				
1	4	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	309,998,526	12	309,998,526	12	309,998,526	12	309,998,526	12	309,998,526	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
1	4	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2,727,230,000	12	1,572,230,000	12	1,622,230,000	12	1,672,230,000	12	1,722,230,000	12	1,772,230,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana terpelihara Sesuai Kebutuhan yang berkualitas	100%	100%	735,579,000	100%	735,579,000	100%	735,579,000	100%	735,579,000	100%	735,579,000	100%	735,579,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	42,750,000	1	42,750,000	1	42,750,000	1	42,750,000	1	42,750,000	1	42,750,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	34	536,560,000	34	536,560,000	34	536,560,000	34	536,560,000	34	536,560,000	34	536,560,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1	4	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	80	61,270,000	80	61,270,000	80	61,270,000	80	61,270,000	80	61,270,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1	4	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	3	94,999,000	3	94,999,000	3	94,999,000	3	94,999,000	3	94,999,000	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



4.2. URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar merumuskan sejumlah subkegiatan prioritas yang sejalan dengan lima program prioritas daerah yang memiliki keterkaitan langsung maupun strategis dengan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup. Kelima program tersebut meliputi: Banjar Tertata, Banjar Lestari, Banjar Tangguh, Banjar Membangun.

A) Banjar Tertata

Fokus pada peningkatan kualitas penataan kawasan permukiman dan kota secara terpadu. Intervensi Dinas diarahkan untuk:

- Penataan dan peremajaan kawasan kumuh.
- Pengembangan kawasan hunian yang terintegrasi dengan ruang publik dan layanan dasar.
- Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis RTRW dan RDTR.

B) Banjar Lestari

Mengedepankan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan partisipatif. Dinas berperan melalui:

- Pengelolaan persampahan berbasis sumber dan fasilitas TPS3R.
- Penanganan limbah domestik dan pencemaran lingkungan.
- Penguatan ruang terbuka hijau, perlindungan DAS, dan konservasi kawasan lindung.

C) Banjar Tangguh

Mendorong ketahanan wilayah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Relevansi Dinas tercermin dalam:



- Pembangunan dan revitalisasi drainase lingkungan permukiman.
- Adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan kawasan.
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana lingkungan.

D) Banjar Membangun

Bertujuan mempercepat pemerataan infrastruktur dasar hingga ke pelosok desa dan kawasan tertinggal. Dinas berkontribusi melalui:

- Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman (jalan lingkungan, drainase, sanitasi).
- Fasilitasi rumah layak huni bagi MBR melalui berbagai skema pembiayaan.
- Dukungan teknis dan pendampingan kepada desa/kelurahan dalam penyusunan rencana kawasan permukiman.
- Dukungan terhadap Program Lintas Sektor Dalam kerangka transformasi digital dan layanan publik berbasis desa, Dinas berkontribusi melalui Penyediaan data spasial permukiman dan lingkungan berbasis SIG.
- Dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Seluruh program dan subkegiatan ini dirancang secara tematik, integratif, dan spasial, sesuai dengan prinsip pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. Dengan pendekatan ini, diharapkan terwujud lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, aman dari bencana, serta memiliki kualitas hidup dan daya dukung lingkungan yang terus meningkat.

Adapun daftar lengkap program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas dalam kerangka Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan



Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut:

Table 4.2.1 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	BANJAR TERTATA
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	BANJAR TERTATA
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	BANJAR BERKARAKTER
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Kelengkapan PSU Permukiman	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	BANJAR TERTATA
			Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	BANJAR SIGAR
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan/atau	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	BANJAR LESTARI



	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kerusakan Lingkungan Hidup		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	BANJAR BERKARAKTER
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Tutupan Lahan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	BANJAR TERTATA
		Meningkatnya Tutupan Lahan Di Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	BANJAR TERTATA
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat peduli lingkungan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	BANJAR LESTARI
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Menurunnya Sampah yang Dibuang ke TPA	Penanganan sampah melalui pengangkutan	BANJAR LESTARI
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	BANJAR BERKARAKTER
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	



4.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025–2029

Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, Pemerintah Daerah telah menetapkan serangkaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Mengingat peran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam urusan pelayanan dasar dan keberlanjutan lingkungan, maka penyusunan Renstra Dinas wajib mengacu penuh pada dokumen RPJMD sebagai kerangka induk pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan demikian, seluruh indikator kinerja Dinas harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target dalam RPJMD, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas, yang mencakup urusan perumahan, kawasan permukiman, sanitasi, air minum, persampahan, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran, dan pelestarian lingkungan hidup.

❖ Misi Kedua

Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui urusan perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mendukung pencapaian misi ini dengan:

- Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi angka backlog dan mendukung pengentasan kemiskinan.
- Penataan kawasan permukiman kumuh untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif secara sosial-ekonomi.



- Penguatan infrastruktur dasar permukiman sebagai stimulus pertumbuhan kawasan strategis ekonomi di wilayah padat dan pinggiran kota.
- Integrasi pembangunan permukiman dengan kawasan agropolitan dan pariwisata untuk memperluas manfaat ekonomi lokal.

❖ **Misi Ketiga**

Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memegang peran utama dalam:

- Penguatan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah melalui peningkatan kapasitas pengawasan dan perizinan lingkungan.
- Perluasan cakupan layanan pengelolaan sampah dan sanitasi berbasis masyarakat, yang mendukung kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
- Perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), rehabilitasi kawasan kritis, dan konservasi keanekaragaman hayati.
- Peningkatan kualitas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan penguatan kelembagaan pengelola lingkungan hidup.
- Adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana ekologis, melalui strategi pembangunan rendah karbon dan kampung iklim.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD akan dikembangkan menjadi indikator sektoral yang mencerminkan:

- Capaian hasil pembangunan di sektor perumahan dan lingkungan hidup
- Sinkronisasi dengan indikator RPJMD dan dokumen nasional (SDGs, RPJMN)



➤ Kesesuaian dengan kewenangan dan tugas pokok perangkat daerah

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar disusun sebagai instrumen utama untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian misi kedua dan ketiga RPJMD selama periode 2025–2029.

IKU ini memuat indikator-indikator yang bersifat hasil (outcome), bukan sekadar keluaran administratif, sehingga mencerminkan efektivitas program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Di antaranya mencakup:

- a) Penurunan luas kawasan permukiman kumuh
- b) Peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- c) Peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
- d) Peningkatan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau
- e) Peningkatan cakupan pengelolaan sampah terlayani
- f) Penurunan tingkat pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah)
- g) Peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten

Dalam kerangka penguatan tata kelola, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menjadi tolok ukur penting yang mencerminkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap manajemen kinerja yang terstruktur, transparan, dan berorientasi hasil. Target predikat SAKIP AA pada akhir periode menjadi simbol bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup



mampu menunjukkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang konsisten, terintegrasi, dan akuntabel.

Capaian kedua dimensi indikator ini, yakni indikator sektoral strategis dan predikat akuntabilitas kinerja, diharapkan mampu mencerminkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang semakin efektif, responsif, dan adaptif dalam mewujudkan permukiman layak dan lingkungan hidup berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

Adapun target kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut, yang memuat indikator kinerja utama serta target capaian tahunannya selama periode 2025–2029:

Table 4.3.1 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD										
No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,15	71,96	72,16	72,36	72,56	72,76	72,96	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,62	71,21	71,51	71,81	72,11	72,41	72,71	
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	55,5	70,73	70,8	70,87	70,94	71,01	71,08	
4	Persentase Permukiman Layak Huni	Persentase	52,60%	53,98%	55,36%	57,44%	60,90%	65,05%	69,20%	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,45	82,81	84,17	85,53	86,89	88,25	89,61	



4.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar selama periode 2025–2029, telah ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang fokus pada dampak nyata terhadap kualitas permukiman dan kondisi lingkungan hidup masyarakat.

IKK tersebut mencerminkan sejauh mana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar memberikan layanan dan intervensi nyata dalam dua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan utama, yaitu:

Table 4.3.2 Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	71,39	71,39	71,6	71,81	72,02	72,24	72,45
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	72,65%	72,65%	75,00%	77,00%	79,00%	81,00%	83,00%
5,3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Persen	3,33%	3,33%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%



	Pemerintah Daerah								
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
4,2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	12,766%	3,37%	6,75%	10,12%	13,49%	16,87%	20,24%
4,4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	3,175	23,18	23,11	23,05	22,98	22,91	22,91
4,5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	94,943%	95,00%	95,25%	95,50%	95,75%	96,00%	96,25%



BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Periode 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selama lima tahun ke depan. Renstra ini disusun untuk memberikan arah, sasaran, dan indikator kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya pada misi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan permukiman layak, serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh:

- a) Kesiapan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi,
- b) Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM),
- c) Ketersediaan sumber pendanaan yang memadai, serta
- d) Komitmen seluruh pimpinan dan staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

Untuk menjamin implementasi yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun. Apabila terjadi perubahan kontekstual yang signifikan, maka revisi terhadap muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah tujuan utama dinas, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.



Renstra ini menjadi acuan kerja utama bagi seluruh unit pelaksana teknis dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan seluruh unit kerja mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan akuntabel, efektif, dan efisien, serta selalu berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah antarperiode, sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan visi jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjar.

Capaian hasil dari pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja yang akan dilaporkan melalui:

- a) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan
- c) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran, dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pencapaian hasil Pembangunan.

Dengan selesainya dokumen Rencana Strategis ini, besar harapan kami agar seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, beserta para pemangku kepentingan lainnya, dapat menjadikannya sebagai acuan bersama dalam bekerja dan berkarya selama lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekadar rencana di atas kertas, tetapi menjadi



kompas yang memandu langkah kita agar tetap selaras, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Tentu, perjalanan pelaksanaan tidak akan selalu mulus—namun dengan kolaborasi, semangat perbaikan, dan komitmen yang kuat, kita percaya bahwa tujuan besar ini dapat dicapai bersama. Semoga upaya kita senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan. Mari bergerak serempak, demi Banjar yang lebih layak huni, bersih, dan berkelanjutan